

**DIPLOMASI KESEHATAN INDONESIA DENGAN CHINA DALAM
KEBIJAKAN IMPOR VAKSIN DAN ALAT KESEHATAN COVID-19**

TAHUN 2020-2023

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

DAVINA SHOFA ARI AGUSTINA

21323287

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**DIPLOMASI KESEHATAN INDONESIA DENGAN CHINA DALAM
KEBIJAKAN IMPOR VAKSIN DAN ALAT KESEHATAN COVID-19**

TAHUN 2020-2023

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:
DAVINA SHOFA ARI AGUSTINA

21323287

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan China dalam Kebijakan Impor Vaksin
dan Alat Kesehatan Covid-19 Tahun 2020-2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Dewan Penguji

- 1 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 2 Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.I.P., M.A.
- 3 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 20 November 2025

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '78E54ANX169516742'.

Davina Shofa Ari Agustina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	8
1.6 Kerangka Pemikiran.....	11
1.7 Argumen Sementara.....	14
1.8 Metode Penelitian.....	17
1.8.1 Jenis Penelitian.....	17
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	17
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	17
1.8.4 Proses Penelitian.....	17
1.9 Sistematika Pembahasan.....	18
BAB 2.....	19
UPAYA DIPLOMASI KESEHATAN INDONESIA KE CHINA.....	19
2.1 Upaya Pemetaan Kebutuhan Sektor Kesehatan Indonesia di Awal Pandemi Covid-19.....	19
2.2 Strategi Diplomasi Kesehatan Indonesia.....	26
BAB 3.....	32
ANALISIS UPAYA DIPLOMASI KESEHATAN INDONESIA DENGAN CHINA DALAM KEBIJAKAN IMPOR DAN ALAT KESEHATAN COVID-19 TAHUN 2020-2023.....	32
3.1 Analisis Elemen <i>Identifying Interests</i> dalam Strategi Negosiasi Diplomasi Kesehatan Indonesia-China.....	34
3.2 Analisis Elemen <i>People</i> dalam <i>Negotiation Tactics</i> Diplomasi Kesehatan Indonesia-China.....	36
3.3 Analisis Elemen <i>Alternatives</i> dalam <i>Negotiation Tactics</i> Pengembangan Kebijakan Kesehatan antara Indonesia dan China.....	40

3.4 Analisis Elemen <i>Options</i> dalam Solusi Diplomasi Kesehatan Indonesia-China.....	46
3.5 Implementasi Elemen <i>Commitments</i> dalam <i>Negotiation Tactics</i> Pelaksanaan Diplomasi Kesehatan Indonesia-China.....	50
3.6 Penerapan Elemen <i>Communication</i> dalam Penguatan Koordinasi Diplomatik Indonesia-China.....	54
BAB 4.....	57
PENUTUP.....	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Rekomendasi.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Kematian di Indonesia	3
Grafik 2. Pemantauan Kasus Covid-19 Indonesia	38
Grafik 3. Perjanjian Pasokan Vaksin Bilateral dengan Produsen	41
Grafik 4. Vaksinasi Covid-19 di Indonesia	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Terpapar Covid-19 di Indonesia	2
Gambar 2. Sinovac	23
Gambar 3. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Xi Jinping	27

DAFTAR SINGKATAN

AAC	: <i>The Asian-African Conference</i>
AID	: <i>Indonesian Agency for International Development</i>
APD	: <i>Alat Pelindung Diri</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BPOM	: <i>Badan Pengawas Obat dan Makanan</i>
BRI	: <i>Belt and Road Initiative</i>
COVAX	: <i>Covid-19 Vaccines Global Access</i>
EUL	: <i>Emergency Use Listing</i>
G20	: <i>Group of Twenty</i>
Kemkes RI	: <i>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NHC	: <i>National Health Commission</i>
NMPA	: <i>National Medical Products Administration</i>
PCR	: <i>Polymerase Chain Reaction</i>
PEPFAR	: <i>The U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief</i>
PoA	: <i>Plan of Action</i>
PPKM	: <i>Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat</i>
PPRA	: <i>Program Pendidikan Reguler Angkatan</i>
PPTM	: <i>Pernyataan Pers Tahunan Menlu</i>
PSBB	: <i>Pembatasan Sosial Berskala Besar</i>
SARS CoV-2	: <i>Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
UEA	: <i>Use Emergency Authorization</i>
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>

ABSTRAK

Pada 2020-2023, hubungan Diplomasi Kesehatan antara Indonesia dan China berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak penanganan pandemi. Kerja sama tersebut dimulai sejak awal 2020, saat Indonesia menghadapi tantangan penyediaan vaksin dan alat kesehatan di tengah tingginya kasus Covid-19. Melalui kemitraan strategis, Indonesia mampu mengakses jutaan dosis vaksin, baik dalam bentuk jadi maupun setengah jadi serta memperoleh bantuan alat kesehatan. Tidak hanya itu, kerja sama ini diperkuat melalui penandatanganan kesepakatan seperti *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait transfer teknologi vaksin dan alat kesehatan. Diplomasi Kesehatan berperan mempererat hubungan bilateral sekaligus meningkatkan kapasitas respons Indonesia terhadap pandemi, sehingga memperlihatkan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan kesehatan. Penelitian mengungkapkan bahwa Indonesia memanfaatkan instrumen teori *Negotiation Tactics* dalam diplomasi kesehatan penerapan perspektif *Policy Type Tactics (Integrative Bargaining)* lewat kerja sama vaksin dan alat kesehatan. Studi ini menggambarkan pada pencarian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Kata-kata kunci: China, Covid-19, Diplomasi Kesehatan, Indonesia, *Integrative Bargaining, Negotiation Tactics*.

ABSTRACT

From 2020 to 2023, Health Diplomacy relations between Indonesia and China developed in response to the urgent need to handle the pandemic. The cooperation began in early 2020, when Indonesia faced challenges in providing vaccines and medical equipment amid high Covid-19 cases. Through strategic partnerships, Indonesia was able to access millions of doses of vaccines, both in finished and semi-finished forms, and obtain medical equipment assistance. Not only that, this cooperation was strengthened through the signing of agreements such as the Memorandum of Understanding (MoU) related to the transfer of vaccine and medical equipment technology. Health diplomacy played a role in strengthening bilateral relations while increasing Indonesia's response capacity to the pandemic, thus demonstrating the importance of international collaboration in facing health challenges. Research reveals that Indonesia utilizes the Negotiation Tactics theory instrument in health diplomacy by applying the Policy Type Tactics (Integrative Bargaining) perspective through cooperation on vaccines and medical equipment. This study illustrates the search for agreements that are beneficial to both parties.

Keywords: China, Covid-19, Health Diplomacy, Indonesia, *Integrative Bargaining, Negotiation Tactics*.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virus Corona adalah sejenis virus terbaru yang berawal dari sebuah virus yang bernama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS CoV-2) atau Covid-19. Pasien yang telah terinfeksi Covid-19 memiliki gejala ringan berupa flu hingga infeksi saluran pernapasan (*pneumonia*) (Atmojo et al. 2020).

Pada tanggal 27 Januari 2020, kebijakan untuk membatasi aktivitas perjalanan dari Provinsi Hubei diumumkan oleh Indonesia, sebab wilayah tersebut merupakan pusat penyebaran Covid-19, sekaligus evakuasi terhadap 238 warga negara Indonesia dari Wuhan. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo memberikan pengumuman terdapat dua orang yang terinfeksi Covid-19 pertama di Indonesia (Djalante et al. 2020). Pasien yang terkonfirmasi Covid-19 dari Jakarta, yang tertular dari warga negara asing Jepang (*World Health Organization* 2021).

Pada bulan Maret 2020, tercatat sebanyak 134 orang meninggal dunia, dan jumlah korban terus meningkat (Loka Data, n.d.). Penyebaran virus tersebut menyebabkan banyak aktivitas sehari-hari manusia menjadi terhambat. Tindakan isolasi saja tidak cukup untuk mencegah penularan Covid-19 secara efektif. Oleh karena itu, Covid-19 merupakan ancaman global yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan yang komprehensif (Sohrabi et al. 2020).

Sebagai langkah awal, pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan *social distancing* kepada masyarakat serta penerapan kebijakan *lockdown* di wilayah tertentu. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19

dengan mewajibkan seluruh masyarakat menjaga jarak minimal 2 meter, menghindari kontak langsung, dan menjauhi kerumunan massa (Buana and Riksa 2020).

Namun, pada kenyataannya, penerapan kebijakan tersebut oleh masyarakat masih kurang optimal, sehingga angka kasus terus mengalami peningkatan. Selain itu, sistem penanganan pandemi di Indonesia dan sumber daya manusia di bidang kesehatan belum sepenuhnya memadai, sementara jumlah pasien terus meningkat tajam. Kedua kebijakan tersebut merupakan bentuk vaksin sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi keadaan darurat (Buana and Riksa 2020).

Gambar 1. Jumlah Terpapar Covid-19 di Indonesia



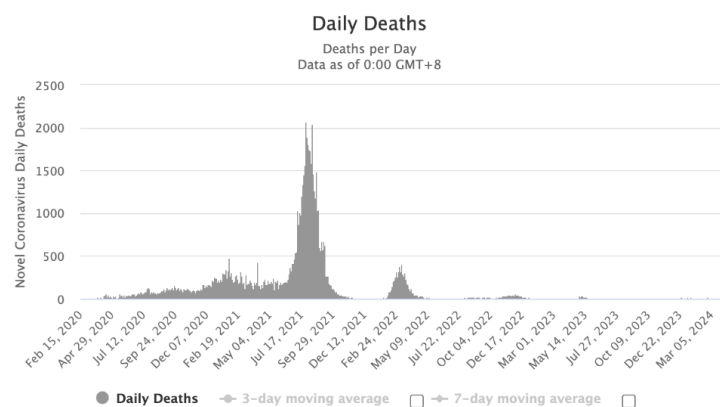
Sumber: Suara.com (2020)

Sementara itu, penyebaran Covid-19 yang meningkat pesat menyebabkan pembatasan pergerakan lintas batas internasional yang berdampak pada sektor distribusi farmasi. Meskipun pandemi ini memberikan peluang bagi industri farmasi untuk meningkatkan penjualan akibat meningkatnya permintaan obat dan

peralatan kesehatan (Ayati, Saiyarsarai, and Nikfar 2020). Keberadaan virus Covid-19 secara terus menerus berdampak besar terhadap ketersediaan obat serta fasilitas pelayanan kesehatan. Keadaan tersebut dapat menyebabkan pasien yang memiliki peluang untuk sembuh menjadi tidak mendapatkan pengobatan yang maksimal sesuai prosedur penanganan Covid-19 (Dharmaningsih, Dwi, and Andriani 2022).

Grafik 1. Jumlah Kematian di Indonesia

Jumlah Kematian Baru Harian di Indonesia



Sumber: Worldometer

Meningkatnya jumlah kematian akibat Covid-19 dipengaruhi oleh faktor usia yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh, sehingga membuat lansia lebih rentan terhadap infeksi virus. Pemerintah sangat meyakini pentingnya vaksin saat ini untuk menghambat penularan Covid-19 dan mengurangi dampak negatifnya terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengambil keputusan untuk mengimpor vaksin Sinovac dari China, karena vaksin tersebut telah diakui kelayakannya oleh *World Health Organization* (WHO) dan memenuhi seluruh kriteria yang menjadi acuan dalam penentuan kelayakan vaksin Covid-19 (Bbc News Indonesia 2020).

Pihak China menyatakan keseriusannya untuk mempererat hubungan kerja sama di bidang vaksin dengan Indonesia dan telah melakukan ekspor vaksin ke Indonesia sebanyak 16 kali. Total vaksin yang telah diterima Indonesia dari China sejak Desember 2020 hingga saat ini mencapai 6,4 juta dosis vaksin siap pakai serta 115,5 juta dosis vaksin dalam bentuk setengah jadi (Antaraneews.com 2021). Terlepas dari vaksin, China juga menjadi pemasok utama produk farmasi dan peralatan kesehatan, terutama alat diagnostik yang digunakan di laboratorium serta alat bantu untuk dekompresi bagian dalam tubuh (Datanesia 2022)

Tahun 2021, hubungan Indonesia dan China telah terjalin lebih dari 70 tahun dan keduanya telah menjadi mitra kerja sama yang cukup erat (Ningsih et al. 2023). Munculnya Covid-19 menjadi masalah global yang harus segera ditangani, termasuk oleh Indonesia dengan China yang menghadapi permasalahan kesehatan serupa. Kerja sama antara kedua negara dalam menangani Covid-19 dimulai sejak awal Maret 2020. Hubungan yang erat antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping mendorong kedua negara untuk sepakat menjalin kerja sama. China menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam kerja sama bidang kesehatan selama masa pandemi Covid-19 (Susilowati et al. 2023).

Melalui kemitraan dengan PT Bio Farma, sebuah perusahaan farmasi milik China, Indonesia berhasil memperoleh jutaan dosis vaksin dalam jumlah besar dari China. Sebagai pendamping, China juga memberikan sejumlah bantuan medis berupa masker dan alat pelindung diri. Kerja sama ini berlanjut dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait transfer

teknologi untuk penggunaan vaksin serta alat-alat kesehatan (Suhita, Ma'rifat, and Ramadina 2021).

Diplomasi Kesehatan Amerika Serikat biasanya difokuskan pada penyediaan dukungan melalui program internasional seperti *United States Agency for International Development* (USAID) dan *The U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief* (PEPFAR). Pada masa pandemi Covid-19, Amerika Serikat juga memberikan vaksin ke beberapa negara melalui program COVAX (Covid-19 *Vaccines Global Access*) serta program bilateral. Namun, upaya tersebut seringkali menghadapi situasi dan ketentuan hukum yang lebih ketat jika dibandingkan dengan China (Antaraneews.com 2023a).

Uni Eropa juga berupaya mengembangkan kerja sama dengan sejumlah negara berkembang yang menghadapi pandemi Covid-19. Melalui mekanisme yang disebut *Team Europe*, Uni Eropa diharapkan dapat mendukung berbagai langkah strategis untuk mengatasi Covid-19. Namun demikian, respon Uni Eropa seringkali berjalan lebih lambat jika dibandingkan dengan cepatnya respon China terhadap Indonesia (Rakhmat and Purnama 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis melihat bahwa hubungan antara Indonesia dengan China yang telah terjalin sejak lama memberikan pengaruh besar terhadap Diplomasi Kesehatan kedua negara saat menghadapi permasalahan kesehatan global berupa wabah Covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia (Susilowati et al. 2023). Jika dibandingkan, Amerika Serikat dan Uni Eropa memiliki karakteristik Diplomasi Kesehatan yang berbeda, yakni cenderung memfokuskan pada persyaratan yang lebih spesifik. Oleh karena itu, Indonesia

perlu mempertahankan kerja sama dengan China sekaligus memperluas peluang untuk menjalin kerja sama (Susilowati et al. 2023).

Penulis menggunakan pendekatan *Conducting Global Health Negotiation* pada Chapter 12 dalam buku yang berjudul *a Guide to Global Health Diplomacy* karya Ilona Kickbusch, Haik Nikogosian, Michel Kazatchkine, Mihály Kökény. Pada Chapter 12 *Conducting Global Health Negotiation* terdapat elemen *Negotiation Tactics and Conflict Resolution*, elemen tersebut akan digunakan sebagai variabel analisis pada penelitian ini. *Negotiation Tactics* mengacu terhadap penggunaan sarana dan hasil yang diinginkan. Terdapat dua jenis *Negotiation Tactics* dalam Diplomasi Kesehatan yaitu *Policy Type Tactics (Integrative Bargaining)* dan *Transaction Type Tactics (Distributive Bargaining)*. Tetapi penelitian ini difokuskan pada penerapan perspektif *Policy Type Tactics (Integrative Bargaining)* (Kickbusch Ilona et al. 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini akan mengangkat rumusan masalah terkait **bagaimana upaya Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan China dalam kebijakan impor vaksin dan alat kesehatan Covid-19 di Indonesia pada tahun 2020-2023?**

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami keadaan Indonesia dalam melakukan upaya Diplomasi Kesehatan dengan China dalam kebijakan impor vaksin dan alat kesehatan Covid-19 di Indonesia pada tahun 2020-2023.
2. Untuk memahami faktor pendorong dan alasan Indonesia melakukan upaya Diplomasi Kesehatan dengan China dalam kebijakan impor vaksin dan alat kesehatan Covid-19 di Indonesia pada tahun 2020-2023.
3. Untuk memahami dampak dari Indonesia melakukan upaya Diplomasi Kesehatan dengan China dalam kebijakan impor vaksin dan alat kesehatan Covid-19 di Indonesia pada tahun 2020-2023.

1.4 Cakupan penelitian

Cakupan penelitian ini menetapkan batasan waktu dari tahun 2020-2023. Pemilihan rentang waktu tersebut didasarkan fakta bahwa tahun 2020 merupakan masuknya Covid-19 ke Indonesia pada awal Maret, dan puncaknya pengiriman vaksin Sinovac dari China tiba pertama kali pada 6 Desember 2020 sebanyak 1,2 juta dosis, khusus untuk memulai vaksinasi tenaga kesehatan sebagai tahap awal program vaksinasi nasional. Ini menjadi langkah strategis awal Indonesia dalam mengimpor vaksin sebagai respons terhadap pandemi. Pada tahun 2021, Indonesia menerima pengiriman besar vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku (bulk) untuk produksi lokal oleh PT Bio Farma, yang memperkuat kemandirian vaksinasi nasional. Vaksinasi massal resmi dimulai dengan Presiden Joko Widodo sebagai penerima pertama pada Januari 2021, serta peningkatan impor alat kesehatan seperti PCR dan APD dari China untuk mendukung kebutuhan darurat.

Pada tahun 2022, fokus beralih pada peningkatan produksi vaksin lokal melalui transfer teknologi dari China dan penguatan suplai vaksin booster berbasis vaksin asal China. Tahun 2023, kerja sama diperluas dalam riset pengembangan vaksin COVID-19 varian baru serta penguatan kapasitas produksi vaksin nasional, menunjukkan kemitraan strategis jangka panjang yang mendukung ketahanan kesehatan Indonesia (Malik and Idrus 2022).

1.5 Tinjauan Pustaka

Fungsi tinjauan pustaka ini adalah untuk mengemukakan secara sistematis hasil penelitian terdahulu yang relevan memberikan pemaparan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya:

Pertama, dalam Jurnal Universitas Gadjah Mada dengan judul “*China’s National Interest in Vaccine Development Cooperation with Indonesia in Handling the Covid-19 Pandemic: Normative and Material*” karya Anisa Risanti Suhita, Filasafia Marsya Ma’rifat, dan Trisni Salsa Ramadina. Penelitian ini meneliti pada konteks bantuan yang diberikan oleh China untuk Indonesia, terdapat kepentingan normatif dan material. Kepentingan normatif tampak terlihat pada kontribusi China dalam memajukan kerja sama dengan Indonesia. Secara umum, bantuan tersebut dalam bentuk pemberian bantuan alat kesehatan, termasuk masker, peralatan tes PCR, APD (Alat Pelindung Diri), dan vaksin, yang merupakan bagian krusial dalam upaya penanganan Covid-19 (Suhita, Ma’rifat, and Ramadina 2021). Sedangkan kepentingan material berupa kepentingan yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan strategis. Berdasarkan konteks pemberian bantuan dari China untuk Indonesia, kepentingan material dapat dilihat dari usaha

China dalam mengembangkan kekuatan perekonomiannya dan meningkatkan keuntungan negaranya. Peneliti berpandangan bahwa pemberian vaksin dan alat kesehatan dari China menjadi cara untuk mewujudkan kepentingan perekonomian China, salah satunya adalah peningkatan hubungan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi dengan Indonesia. Ini tercermin dari peran China yang terlibat secara langsung dengan Indonesia dalam pengembangan vaksin Covid-19 dan menjadikan Indonesia salah satu mitra utamanya (Suhita, Ma'rifat, and Ramadina 2021). Penelitian ini belum melakukan pembahasan mengenai resiko politik dalam kerja sama Indonesia dengan China dalam impor vaksin.

Kedua, dalam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i dengan judul “Kerjasama Bilateral Indonesia-Tiongkok Dalam Diplomasi Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19” karya Ida Susilowati, Anisa Nuryanti Affandi, Cut Jihan Raihana, dan Elsa Iqlima Az-Zahra. Penelitian ini meneliti tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok yang semakin membaik dan memiliki kekuatan dalam menangani pandemi Covid-19. Berdasarkan penelitian ini, terlihat bahwa hubungan bilateral yang terjalin antara kedua negara, sehingga mengindikasikan keberhasilan kerja sama yang terjalin dalam pengendalian pandemi Covid-19. Penelitian ini juga memperlihatkan adanya penurunan ketergantungan Indonesia pada impor vaksin Covid-19 dari Tiongkok (Susilowati et al. 2023). Pada tahun 2020, angka impor vaksin Covid-19 dari Tiongkok tercatat mencapai 80 persen, sementara di tahun 2021 angka impor vaksin Covid-19 dari Tiongkok mengalami penurunan senilai 40 persen. Penelitian yang dilakukan juga memperlihatkan adanya hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok telah menurunkan angka ketergantungan impor alat kesehatan Covid-19 dari Tiongkok. Di tahun

2020, impor alat kesehatan Covid-19 dari Tiongkok tercatat sebesar 90 persen, sementara di tahun 2021, impor alat kesehatan Covid-19 dari Tiongkok mengalami penurunan senilai 50 persen (Susilowati et al. 2023). Penelitian ini belum menjelaskan mengenai alasan terjadinya penurunan ketergantungan Indonesia pada pengimporan vaksin Covid-19 di tahun 2023.

Ketiga, dalam Jurnal Sentris Edisi Khusus Diplomasi dengan judul “Aktivitas Diplomasi Kesehatan Indonesia-Tiongkok di Masa Pandemi Covid-19” karya Valerie Tania Margo, Nivy Irawan, Jacinda Graciella, Veronica Ivana Putri Calista, dan Henny Kristanto Setiawan. Penelitian ini meneliti tentang peran dari hubungan diplomasi dalam melakukan pengimporan vaksin dan alat kesehatan dari Tiongkok ke Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti tersebut menggunakan metode deskriptif yang disertai dengan analisis kualitatif. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap data dari sejumlah sumber, seperti media, data dari badan kesehatan, dan juga data statistik (Margono et al. 2021). Melalui hasil penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa peran Diplomasi Kesehatan Indonesia dan Tiongkok dalam menangani Covid-19 sangat penting dan masih ada sejumlah kekurangan yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan proses impor vaksin dan alat kesehatan untuk mengurangi pengaruh negatif akibat Covid-19, dan mengurangi risiko munculnya keraguan pada proses pengimporan (Margono et al. 2021). Penelitian ini belum menjelaskan mengenai keamanan dalam melakukan pengimporan vaksin ke Indonesia, dan belum melakukan pembahasan mengenai standar kualitas dari vaksin dikarenakan pada saat itu badan pengawas belum melakukan persetujuan.

Keempat, dalam *Global Insight Journal* dengan judul “Kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam Menangani Covid-19 Periode 2020-2022” karya Rizky Agustie. Penelitian ini meneliti tentang mengevaluasi bentuk-bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dan China dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk dalam pengadaan peralatan medis, pengembangan vaksin, serta bantuan teknis dan medis. Penelitian tersebut juga menilai tingkat efektivitas kerja sama dan menekankan pada peran koordinasi dan komunikasi kedua negara terhadap penanganan pandemi (Agustie 2025). Akan tetapi, dalam penelitian tersebut masih ada beberapa bagian yang belum diteliti lebih mendalam, khususnya yang terkait dengan Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan Tiongkok dalam kebijakan impor vaksin dan alat kesehatan Covid-19 tahun 2020-2023. Beberapa aspek yang belum diteliti secara mendalam adalah dampak geopolitik dan masalah kedaulatan yang timbul dalam hubungan bilateral, seperti konflik di Laut Natuna yang memiliki potensi untuk mempengaruhi dinamika kerja sama kesehatan. Selain itu, aspek peran aktor non pemerintah dan sektor swasta dalam Diplomasi Kesehatan bilateral masih belum banyak dikupas dengan rinci, padahal keduanya memiliki peran penting dalam implementasi dan keberlangsungan kerja sama impor vaksin dan alat kesehatan dari China ke Indonesia.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian yang berjudul Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan China dalam Kebijakan Impor Vaksin dan Alat Kesehatan Covid-19 tahun 2020-2023, penulis menggunakan pendekatan *Conducting Global Health Negotiation* pada Chapter 12 dalam buku yang berjudul *a Guide to Global Health Diplomacy* karya

Ilona Kickbusch, Haik Nikogosian, Michel Kazatchkine, Mihály Kökény. Pada Chapter 12 *Conducting Global Health Negotiation* terdapat elemen *Negotiation Tactics and Conflict Resolution*, elemen tersebut akan digunakan sebagai variabel analisis pada penelitian ini. *Negotiation Tactics* mengacu terhadap penggunaan sarana dan hasil yang diinginkan. Terdapat dua jenis *Negotiation Tactics* dalam Diplomasi Kesehatan yaitu *Policy Type Tactics (Integrative Bargaining)* dan *Transaction Type Tactics (Distributive Bargaining)* (Kickbusch Ilona et al. 2021).

Pada *Policy Type Tactics (Integrative Bargaining)* menjelaskan bahwa strategi negosiasi yang mencoba untuk menyelesaikan perselisihan dengan solusi yang dapat diterima bersama dan keuntungan bersama tersebut bertindak sebagai motivasi bagi pihak-pihak yang terlibat (Kickbusch Ilona et al. 2021).

Terdapat 7 elemen di *Policy Type Tactics (Integrative Bargaining)*:

1. *Identifying Interests*

Mencoba memahami kepentingan masing-masing pihak dan bagaimana kepentingan dipenuhi melalui solusi yang saling menguntungkan.

2. *People*

Memisahkan orang dari masalah. Semakin baik hubungan antar negosiator, semakin besar kemungkinan tercapainya solusi terbaik yang saling menguntungkan.

3. *Alternatives*

Sangat penting untuk memikirkan alternatif bahkan sebelum negosiasi dimulai. Jika negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, adanya alternatif berarti diskusi dapat dilanjutkan di lain waktu.

4. *Options*

Mengusulkan opsi realistis bersama pihak lain membantu mencapai solusi yang saling menguntungkan. Hal ini dapat dilakukan melalui curah pendapat kolektif.

5. *Criteria/legitimacy*

Terkadang dua atau lebih pihak dapat mengajukan solusi yang tidak sesuai. Dalam kasus seperti itu, memilih satu solusi, meskipun tampak adil, dapat memicu rasa dendam. Sebaliknya pengambilan keputusan bersama dapat membantu mencapai kesepakatan.

6. *Commitments*

Negosiasi hanya dapat berhasil jika semua pihak menghormati hasil dan menepati janji mereka

7. *Communication*

Komunikasi yang baik penting untuk mencapai solusi terbaik dan dapat membantu mengatasi skeptisisme atau permusuhan pihak lain.

Sedangkan *Transaction Type Tactics (Distributive Bargaining)* menjelaskan strategi tawar-menawar kompetitif yaitu satu pihak yang diuntungkan jika pihak lain mengalami kerugian. Tujuannya bukan untuk mencapai situasi win-win melainkan agar satu pihak memperoleh keuntungan sebanyak mungkin. Kedua pihak akan berusaha mendapatkan bagian maksimum dari aset atau sumber daya yang perlu didistribusikan (Kickbusch Ilona et al. 2021).

Sehingga *Policy Type Tactics (Integrative Bargaining)* digunakan dalam penelitian ini untuk menekan bentuk negosiasi yang berfokus pada kerja sama, kesetaraan, dan pencapaian hasil yang saling menguntungkan bagi seluruh pihak

yang terlibat. Perspektif ini menggambarkan proses diplomasi yang tidak didasari oleh persaingan atau dominasi satu pihak, melainkan pada upaya menemukan titik temu melalui kepentingan bersama. Negosiasi yang dilakukan dalam kerangka ini menekankan pentingnya keterbukaan, komunikasi yang efektif, dan pembangunan rasa saling percaya untuk menciptakan kesepakatan yang berkelanjutan (Kickbusch Ilona et al. 2021).

Dengan demikian, perspektif tersebut juga menunjukkan orientasi jangka panjang, dalam hasil yang dicapai tidak hanya menyesuaikan isu tertentu, tetapi juga memperkuat hubungan antar pihak dalam menghadapi tantangan serupa di masa mendatang. Prinsip-prinsip seperti kolaborasi, komitmen, serta pencarian solusi *win-win* menjadi dasar utama dalam membentuk proses diplomasi yang lebih inklusif dan konstruktif. Melalui perspektif tersebut, *Policy Type Tactics (Integrative Bargaining)* dianggap mengutamakan solidaritas dan kepentingan bersama dibandingkan keuntungan sepihak.

Berdasarkan fokus pada penelitian ini yakni Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan China dalam Kebijakan Impor Vaksin dan Alat Kesehatan Covid-19 Tahun 2020-2023. Dalam teori *Negotiation Tactics* terdapat enam elemen yang relevan dengan penelitian yakni *Identifying Interests, People, Alternatives, Options, Commitments*, dan *Communication*.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan kerangka teori *Negotiation Tactics* dalam diplomasi kesehatan karya Ilona Kickbusch, Haik Nikogosian, Michel Kazatchkine, Mihály Kökény dalam buku yang berjudul *a Guide to Global Health Diplomacy*.

Penelitian ini difokuskan pada penerapan perspektif *Policy Type Tactics (Integrative Bargaining)* dengan enam elemen yang relevan, yaitu *Identifying Interests, People, Alternatives, Options, Commitments*, dan *Communication*.

Pertama, elemen *Identifying Interests*, Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan China menunjukkan adanya kepentingan nasional yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan vaksin Covid-19 secara cepat dan merata. Bagi Indonesia, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam menjamin ketersediaan vaksin di tengah keterbatasan produksi dalam negeri. Sementara bagi China, kerja sama tersebut memperkuat posisi sebagai mitra utama kawasan Asia dalam distribusi vaksin dan alat kesehatan.

Kedua, elemen *People*, melalui kemampuan kedua negara dalam membangun komunikasi interpersonal dan diplomatik yang terbuka selama pandemi Covid-19. Kemampuan Indonesia dengan China untuk menyeimbangkan perbedaan kepentingan tanpa menimbulkan ketegangan diplomatik.

Ketiga, elemen *Alternatives*, tercermin melalui berbagai opsi negara mitra dan mekanisme pengadaan yang tersedia sebelum Indonesia menetapkan skema multilateral, Indonesia menilai bahwa kerja sama dengan China merupakan pilihan paling realistis dalam hal waktu, ketersediaan, dan jumlah pasokan vaksin.

Keempat, elemen *Options*, kedua negara mengembangkan berbagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan, seperti transfer teknologi, pengadaan bahan baku vaksin, dan dukungan logistik dan alat kesehatan. Proses ini memperkuat nilai tambah hubungan bilateral dengan menciptakan solusi bersama dalam menghadapi tantangan pandemi.

Kelima, elemen *Commitments*, terlihat dari kesungguhan kedua negara dalam melaksanakan kesepakatan yang telah disetujui. Indonesia memastikan vaksin yang diterima telah melalui uji klinis dan perizinan dari BPOM, sedangkan China menunjukkan komitmen melalui pengiriman vaksin dan alat kesehatan secara berkelanjutan sesuai kesepakatan waktu.

Keenam, elemen *Communication*, memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan kerja sama dan mencegah terjadinya kesalahpahaman diplomatik. Komunikasi yang intens antara Kementerian, lembaga kesehatan, dan perwakilan diplomatik kedua negara memastikan setiap tahapan kerja sama berjalan transparan dan sesuai kepentingan bersama.

Melalui keenam elemen tersebut, Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan China memperlihatkan proses negosiasi yang berperspektif *Policy Type Tactics (Integrative Bargaining)* yaitu kedua pihak berupaya membangun hubungan saling menguntungkan, memperkuat solidaritas, serta mendukung stabilitas kesehatan publik di tengah situasi darurat akibat pandemi Covid-19. Perspektif ini juga menggambarkan proses negosiasi yang tidak bersifat kompetitif, tetapi berorientasi pada penciptaan solusi bersama yang berkelanjutan.

Pada argumen sementara tidak membahas elemen *Criteria/legitimacy* dinilai kurang relevan karena proses negosiasi antara Indonesia dan China tidak berfokus pada perumusan tolak ukur objektif baru, melainkan mengikuti standar internasional yang telah ada.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan metode penelitian ini bersifat deskriptif untuk menjawab bagaimana keadaan, faktor pendorong dan dampak Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan China. Penelitian ini juga bersifat analitis untuk menjawab bagaimana upaya Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan China dalam kebijakan impor vaksin dan alat kesehatan Covid-19 di Indonesia pada tahun 2020-2023.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia dan objek penelitian ini upaya Diplomasi Kesehatan Indonesia terhadap China.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan berdasarkan referensi literatur dan data sekunder berupa jurnal, buku, situs website yang telah terpercaya, laporan resmi dari suatu organisasi dan artikel berita yang berhubungan dengan topik penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini akan mengumpulkan seluruh data yang telah didapatkan dari sumber literatur yang nantinya akan ditelaah, dengan tujuan memastikan kebenaran data yang didapatkan untuk menjawab bagaimana keadaan, faktor pendorong dan dampak dari Indonesia melakukan upaya Diplomasi Kesehatan dengan China dalam kebijakan impor vaksin dan alat kesehatan Covid-19 di Indonesia pada tahun 2020-2023.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab pertama memuat uraian pendahuluan yang mencakup latar belakang timbulnya masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua menyajikan Upaya Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan China. dibagi menjadi 2 Sub bab. Pertama, 2.1 Upaya Pemetaan Kebutuhan Sektor Kesehatan Indonesia di Awal Pandemi Covid-19. Kedua, 2.2 Strategi Diplomasi Kesehatan Indonesia.

Bab ketiga menjelaskan Negotiation Tactics sebagai Elemen Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan China dalam Kebijakan Impor Vaksin dan Alat Kesehatan Covid-19 Tahun 2020-2023, dibagi menjadi 6 Sub bab. Pertama, 3.1 Analisis Elemen *Identifying Interests* dalam Strategi Negosiasi Diplomasi Kesehatan Indonesia-China. Kedua, 3.2 Analisis Elemen *People* dalam *Negotiation Tactics* Diplomasi Kesehatan Indonesia-China. Ketiga, Analisis Elemen *Alternatives* dalam *Negotiation Tactics* Pengembangan Kebijakan Kesehatan antara Indonesia dan China. Keempat, 3.4 Analisis Elemen *Options* dalam Solusi Diplomasi Kesehatan Indonesia-China. Kelima, 3.5 Implementasi Elemen *Commitments* dalam *Negotiation Tactics* Pelaksanaan Diplomasi Kesehatan Indonesia-China. Keenam, 3.6 Penerapan Elemen *Communication* dalam Penguatan Koordinasi Diplomatik Indonesia-China.

Bab keempat menyajikan mengenai kesimpulan hasil akhir dari perumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang disertai dengan rekomendasi.

BAB 2

UPAYA DIPLOMASI KESEHATAN INDONESIA DENGAN CHINA

Diplomasi Kesehatan antara Indonesia dan China selama pandemi Covid-19 merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus mempererat hubungan bilateral kedua negara. Sejak awal munculnya pandemi, Indonesia menerima berbagai bantuan medis dari China, termasuk APD (Alat Pelindung Diri), peralatan medis, serta vaksin Covid-19. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping menegaskan komitmen kuat kedua negara dalam memperkuat kerja sama ini. China menjadikan Indonesia sebagai salah satu prioritas utama dalam kerja sama kesehatan, yang meliputi pelatihan tenaga medis dan penyediaan teknologi kesehatan canggih untuk penanganan pandemi (Maysarah 2024).

Langkah ini tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak selama masa pandemi, tetapi juga bertujuan mempererat hubungan jangka panjang antara kedua negara. Diplomasi di bidang kesehatan tersebut membuka kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat kapasitas sistem kesehatannya secara nasional. Selain itu, kerja sama ini juga mencerminkan kepentingan strategis China dalam upayanya memperbaiki citra global serta memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara (Margono et al. 2021).

2.1 Upaya Pemetaan Kebutuhan Sektor Kesehatan Indonesia di Awal Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 menghadirkan tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam menghadapi situasi ini, Kemenkes RI (Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia) berperan sebagai wakil pemerintah yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat. Tugas Kemenkes RI tidak hanya meliputi pengawasan aspek kesehatan, tetapi juga mengidentifikasi serta menangani berbagai permasalahan dan kebutuhan penting selama pandemi berlangsung. Salah satu langkah awal yang diambil adalah menentukan kebutuhan mendesak seperti vaksin dan alat kesehatan. Kemenkes RI secara terbuka menginformasikan kebutuhan akan alat kesehatan seperti masker, *face shield*, alat PCR (*Polymerase Chain Reaction*), dan alat pelindung diri agar semua pihak dapat memahami kondisi yang ada dan ikut berkontribusi dalam penanganan pandemi (Hadori 2022).

Kemenkes RI rutin mengadakan konferensi pers sebagai sarana untuk menyampaikan informasi penting kepada masyarakat dan pihak terkait. Melalui konferensi ini, Kemenkes RI menyampaikan update terkini mengenai kondisi kesehatan, kebutuhan alat kesehatan, serta tindakan yang telah dilakukan dalam penanganan Covid-19. Konferensi pers juga menjadi forum untuk menjawab pertanyaan dari media dan publik, sehingga transparansi informasi tetap terjaga. Selain itu, Kemenkes RI secara berkala menerbitkan laporan resmi yang ditujukan kepada seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga terkait, dan sektor swasta. Laporan tersebut memuat rincian kebutuhan terkini dalam penanganan pandemi Covid-19. Adanya laporan resmi ini, para pengambil kebijakan dapat memahami prioritas utama dan menentukan langkah strategis untuk meningkatkan sistem kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, n.d.).

Salah satu fokus utama dalam laporan tersebut adalah peningkatan kapasitas layanan rumah sakit. Kemenkes RI menyadari bahwa dengan

meningkatnya jumlah pasien Covid-19, rumah sakit harus mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi lonjakan pasien. Oleh karena itu, vaksinasi menjadi solusi utama dalam penanganan Covid-19. Kemenkes RI telah merancang berbagai strategi untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi di seluruh Indonesia. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta, Kemenkes RI berupaya memastikan vaksin dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (Kemenkes 2021).

Kemenkes RI juga membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk memastikan ketersediaan alat kesehatan dan vaksin. Kerja sama ini sangat penting karena sektor swasta memiliki kapasitas produksi yang dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan vaksin. Dengan adanya kerja sama, diharapkan kebutuhan tersebut dapat terpenuhi secara cepat dan terkoordinasi dengan baik. Selain fokus pada penyediaan alat kesehatan dan vaksinasi, Kemenkes RI juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan. Melalui kampanye yang intensif, Kemenkes RI berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan penularan Covid-19, seperti penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan benar secara rutin (Arlinta 2021).

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19 kerap mengalami perubahan, seperti pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Pergantian kebijakan ini bisa berdampak pada efektivitas bantuan yang diberikan oleh China. Contohnya, jika pembatasan mobilitas diberlakukan secara ketat, distribusi vaksin dan alat kesehatan bisa terhambat sehingga mengurangi manfaat bantuan tersebut.

Selain itu, ketidakpercayaan dunia terhadap transparansi informasi yang disampaikan China mengenai pandemi Covid-19 dapat memengaruhi pandangan Indonesia terhadap komitmen China dalam kerja sama kesehatan. Jika masyarakat dan pemangku kepentingan di Indonesia meragukan keakuratan informasi dari China, hal ini dapat menurunkan efektivitas kerja sama dan menimbulkan keraguan terhadap kualitas produk yang diterima. Diplomasi Kesehatan sering kali dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi China sendiri. Hal ini dapat membuat negara-negara penerima merasa bahwa bantuan tersebut bukan sepenuhnya bersifat altruistik, melainkan strategi untuk memperluas pengaruh politik China di wilayah tersebut. Situasi ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi Indonesia dalam mempererat hubungan dengan China (Kompaspedia 2021).

Pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia menyebabkan krisis kesehatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa dekade. Semua negara berlomba-lomba untuk memperoleh akses vaksin Covid-19 guna mengendalikan penyebaran virus dan melindungi warganya. Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, Indonesia memikul tanggung jawab besar dalam menghadapi pandemi ini. Kebutuhan vaksin yang sangat mendesak menjadikan hal tersebut sebagai prioritas utama bagi Indonesia. Mengingat keterbatasan kapasitas produksi vaksin dalam negeri, Indonesia menjalankan Diplomasi Kesehatan dengan menjalin kerja sama bersama negara-negara yang sudah memiliki kemampuan produksi vaksin yang memadai. China, sebagai negara pertama yang berhasil memproduksi vaksin Covid-19, menjadi mitra strategis dalam mendukung ketersediaan vaksin di

Indonesia. Upaya diplomasi ini dianggap krusial untuk memastikan tersedianya vaksin yang aman dan efektif bagi masyarakat Indonesia. Pertemuan yang positif antara Presiden Joko Widodo dan Xi Jinping memberikan dorongan politik yang kuat bagi pelaksanaan kerja sama ini. Pertukaran informasi dan dialog langsung antara kedua pemimpin semakin memperkuat komitmen bersama dalam mengatasi pandemi. Keterlibatan politik yang tinggi ini juga menjamin proses negosiasi dan pelaksanaan kerja sama berjalan lebih cepat dan lancar (Unairnews 2023).

Gambar 2. Sinovac



Sumber: Cnbc Indonesia (2020)

Kedatangan vaksin Covid-19 dari China ke Indonesia berlangsung secara bertahap sejak akhir tahun 2020 dan menunjukkan intensitas kerja sama yang erat antara kedua negara. Pengiriman pertama dilakukan pada 6 Desember 2020 dengan membawa 1,2 juta dosis vaksin jadi produksi Sinovac, disusul tahap kedua pada 31 Desember 2020 sebanyak 1,8 juta dosis vaksin jadi. Memasuki awal 2021, Indonesia mulai menerima bahan baku atau *bulk* vaksin untuk diolah oleh PT Bio Farma (Persero), yakni 15 juta dosis pada 12 Januari 2021, 10 juta dosis pada 2 Februari 2021, dan 10 juta dosis lagi pada 2 Maret 2021. Pengiriman

berikutnya juga terus berlanjut, antara lain 16 juta dosis bahan baku pada 25 Maret dan 6 juta dosis pada 14 April. Hingga tahap kesepuluh, pemerintah telah mendatangkan tambahan 6 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac. Rangkaian pengiriman ini menandai komitmen kuat antara Indonesia dan China dalam memperkuat ketersediaan vaksin serta mempercepat pelaksanaan program vaksinasi nasional (Dewi 2021). Pada tahun 2022, Indonesia berhasil memperoleh total sekitar 470 juta dosis vaksin Covid-19 dari berbagai produsen, termasuk Sinovac, yang memperkuat upaya pemerintah dalam mencapai kekebalan komunitas secara nasional (Hidayat, Anam, and Munir 2022).

Sementara itu, kerja sama vaksin yang paling besar terjalin antara Bio Farma sebagai perusahaan farmasi milik negara Indonesia dengan Sinovac Biotech dari China. Bio Farma memegang peran penting dalam proses produksi, uji klinis, dan distribusi vaksin di dalam negeri sehingga menjadi aktor utama dalam kolaborasi kesehatan antara kedua negara (Antara News 2020). Langkah ini memperkuat kapasitas produksi vaksin dalam negeri dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor vaksin. Selain itu, inisiatif ini meningkatkan daya saing industri farmasi Indonesia di tingkat regional. Diplomasi Kesehatan ini memberikan keuntungan bagi kedua pihak, selain mempererat hubungan bilateral dengan Indonesia, China juga memperoleh akses cepat terhadap informasi dan pengalaman dalam penanganan pandemi Covid-19. Kerja sama tersebut turut memperbaiki citra internasional China yang sempat menurun akibat stigma pandemi, sekaligus menunjukkan kemampuan China dalam Diplomasi Kesehatan dan solidaritas global (Antaraneews.com 2020).

Diplomasi Kesehatan ini memperkuat posisi China di wilayah Asia Tenggara. Dengan berperan sebagai pemasok utama vaksin Covid-19 untuk Indonesia, China menunjukkan komitmennya dalam mendukung stabilitas dan kesehatan di kawasan tersebut. Hal ini turut meningkatkan pengaruh China di Asia Tenggara sekaligus memperkuat strategi kemitraannya dengan negara-negara di wilayah ini. Kerja sama Diplomasi Kesehatan antara Indonesia dan China selama periode 2020-2023, yang berfokus pada pengadaan vaksin Covid-19, menjadi contoh keberhasilan kolaborasi internasional dalam menghadapi krisis kesehatan global. Kedua negara memperoleh manfaat besar dari kerja sama tersebut, termasuk penguatan hubungan bilateral, peningkatan kapasitas kesehatan, dan perbaikan citra di mata dunia. Diplomasi Kesehatan pun menjadi alat penting dalam mempererat hubungan antara Indonesia dan China di tengah berbagai tantangan global (Yahya and Simatupang 2023).

Diplomasi Kesehatan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kompleksitas isu kesehatan global, keterbatasan sumber daya, perbedaan kepentingan antar negara, serta dinamika geopolitik yang berubah-ubah. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia perlu meningkatkan kemampuan diplomasi, memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah, serta membangun kemitraan yang lebih erat dengan sektor swasta dan masyarakat sipil. Diplomasi Kesehatan akan menjadi semakin krusial dalam menghadapi tantangan kesehatan global yang semakin rumit dan dinamis. Dengan penerapan strategi yang tepat, Indonesia berpotensi memainkan peran lebih besar dalam meningkatkan kesehatan dunia, melindungi kepentingan nasional, serta memperkuat posisinya sebagai pemimpin

di bidang kesehatan di kawasan Asia Tenggara maupun di tingkat global (Margono et al. 2021).

2.2 Strategi Diplomasi Kesehatan Indonesia

Diplomasi Kesehatan menjadi salah satu pilar utama dalam politik luar negeri Indonesia, yang menunjukkan komitmen negara untuk berperan aktif dalam peningkatan kesehatan di tingkat global. Kesehatan tidak hanya dianggap sebagai isu dalam negeri, melainkan juga sebagai bagian penting dari keamanan dan stabilitas dunia. Melalui Diplomasi Kesehatan, Indonesia berusaha memperkuat posisinya sebagai aktor utama dalam tata kelola kesehatan internasional. Fokus utama Diplomasi Kesehatan Indonesia adalah mengatasi berbagai tantangan kesehatan lintas negara yang kompleks, seperti penyakit menular, pandemi, resistensi terhadap obat, serta isu kesehatan lingkungan. Penyelesaian masalah ini membutuhkan kerja sama internasional yang erat dan kolektif. Oleh karena itu, Indonesia turut aktif dalam berbagai forum global guna mendorong kebijakan yang efektif dan inklusif dalam menghadapi ancaman kesehatan (Widyawati 2020).

Gambar 3. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Xi Jinping



Sumber: Voa (2021)

Peningkatan kapasitas kesehatan nasional menjadi fokus utama dalam Diplomasi Kesehatan Indonesia. Melalui mekanisme pertukaran ilmu, pelatihan, dan transfer teknologi, Indonesia berupaya memperkuat sistem kesehatan nasional, meningkatkan mutu layanan kesehatan, serta mengembangkan sumber daya manusia yang ahli dan profesional di bidang kesehatan. Kerja sama dengan negara-negara maju dan organisasi internasional menjadi faktor penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Kerja sama bilateral maupun multilateral menjadi pondasi utama Diplomasi Kesehatan Indonesia. Kemitraan strategis dengan negara-negara mitra memungkinkan Indonesia untuk saling bertukar pengalaman, sumber daya, dan keahlian dalam mengatasi berbagai tantangan kesehatan. Selain itu, keterlibatan aktif Indonesia dalam organisasi internasional seperti WHO, ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), dan G20 (*Group of Twenty*) menyediakan ruang bagi Indonesia untuk memberikan pengaruh terhadap agenda kesehatan global sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat dunia (Humas Bkpk 2022).

Bantuan kemanusiaan merupakan bukti nyata komitmen Indonesia dalam menunjukkan solidaritas global di bidang kesehatan. Saat negara lain mengalami krisis kesehatan, Indonesia siap memberikan dukungan berupa bantuan medis, logistik, serta tenaga ahli guna mengurangi penderitaan dan mempercepat proses pemulihan. Bantuan tersebut tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga memperkuat citra positif Indonesia di kancah internasional. Selain itu, Diplomasi Kesehatan Indonesia juga berperan penting dalam mengembangkan kepentingan ekonomi nasional di sektor kesehatan. Melalui kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata medis, Indonesia berupaya meningkatkan daya saing industri kesehatan domestik, menarik investasi asing, serta menciptakan lapangan kerja baru. Promosi produk farmasi dan alat kesehatan hasil produksi dalam negeri juga menjadi bagian dari strategi ini (Jannah et al. 2024).

Strategi utama Indonesia dalam Diplomasi Kesehatan adalah memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral. Indonesia tidak hanya membangun hubungan dengan negara-negara mitra, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti WHO, ASEAN, dan AAC (*The Asian-African Conference*). Melalui platform tersebut, Indonesia berupaya mengimplementasikan kebijakan kesehatan yang mendukung pencapaian tujuan global, terutama SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang berkaitan dengan kesehatan, seperti menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau (Limantara et al., n.d.).

Selain itu, China menerapkan strategi diplomasi yang berlandaskan pada prinsip “*Win-Win*” (Margono et al. 2021). Dalam konteks Diplomasi Kesehatan,

hal ini berarti China memberikan bantuan kepada Indonesia dengan memastikan bahwa kerja sama tersebut memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua belah pihak, khususnya bagi China. Pendekatan ini tampak jelas dalam upaya China untuk mengembangkan kapasitas kesehatan di Indonesia, termasuk melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan obat-obatan, dan peralatan medis. Langkah ini tidak hanya bertujuan memperkuat citra China sebagai mitra yang mendukung masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan, tetapi juga membuka peluang untuk memperluas pengaruh politik dan ekonomi China di wilayah tersebut (Aisha 2023).

Pada beberapa tahun terakhir, China aktif memberikan bantuan di bidang kesehatan, khususnya selama pandemi Covid-19. China memanfaatkan kapasitas produksi vaksinnya sendiri untuk mendistribusikan vaksin ke berbagai negara berkembang. Langkah ini merupakan bagian dari strategi diplomasi vaksin China, yang tidak hanya bertujuan membantu negara-negara yang kesulitan mendapatkan vaksin, tetapi juga mempererat hubungan diplomatik antara China dengan negara-negara penerima bantuan tersebut (Agape 2021).

Melihat kondisi tersebut, Indonesia sebagai negara besar dengan sistem kesehatan yang masih menghadapi berbagai tantangan memiliki peluang besar untuk mempererat hubungan diplomatik dengan China melalui diplomasi kesehatan. Indonesia dapat memanfaatkan pendekatan China yang menekankan kerja sama bilateral dan multilateral guna meningkatkan infrastruktur kesehatan di dalam negeri. Contohnya, Indonesia dapat menjalin kemitraan dengan China dalam pembangunan rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah yang kurang

berkembang. Kerja sama ini dapat meliputi pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik, serta pelatihan bagi tenaga medis (Agustie 2025).

Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama dengan China dalam bidang riset dan pengembangan kesehatan. China, dengan kapasitas besar dalam inovasi bioteknologi dan penelitian kesehatan, dapat menjadi mitra strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan kemampuan riset kesehatan domestik. Contohnya, kerja sama dapat difokuskan pada pengembangan vaksin dan pengobatan penyakit yang berdampak signifikan di kawasan Asia Tenggara. Kolaborasi semacam ini tidak hanya meningkatkan kapasitas riset Indonesia, tetapi juga memberikan kesempatan bagi China untuk berkolaborasi dengan negara besar yang memiliki posisi strategis di kawasan (Agustie 2025).

Diplomasi vaksin menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Dengan populasi yang besar, Indonesia dapat meraih keuntungan signifikan melalui kerja sama dengan China dalam hal distribusi vaksin. Selama pandemi Covid-19, China aktif mengirimkan vaksin ke berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga menjadi mitra strategis dalam memastikan akses vaksin dan obat-obatan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dapat memperkuat posisinya di forum-forum internasional seperti WHO dengan menjalin kerja sama yang lebih erat bersama China. Dalam forum tersebut, Indonesia berkesempatan mengangkat isu-isu kesehatan global yang relevan dengan kepentingannya, sekaligus memperoleh dukungan dari China untuk memperkuat peran serta Indonesia di kancah internasional (Voa Indonesia 2021).

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk memanfaatkan Diplomasi Kesehatan sebagai sarana memperkuat hubungan

dengan China. Kerja sama yang berkelanjutan di berbagai bidang, mulai dari pengembangan infrastruktur kesehatan, pelatihan tenaga medis, riset, hingga distribusi vaksin, dapat meningkatkan kapasitas sistem kesehatan Indonesia sekaligus memperluas pengaruh negara ini dalam diplomasi internasional. Dengan pendekatan yang cermat dan strategis, Indonesia dapat menjalin hubungan dengan China yang menghasilkan solusi saling menguntungkan bagi kedua negara (Antaraneews.com 2023b).

BAB 3

NEGOTIATION TACTICS SEBAGAI ELEMEN DIPLOMASI KESEHATAN INDONESIA DENGAN CHINA DALAM KEBIJAKAN IMPOR VAKSIN DAN ALAT KESEHATAN COVID-19 TAHUN 2020-2023

Upaya Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan China selama masa pandemi Covid-19 merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam menjamin ketersediaan vaksin dan alat kesehatan nasional. Pandemi yang melanda sejak awal tahun 2020 menimbulkan tekanan besar terhadap sistem kesehatan Indonesia, sehingga pemerintah harus segera menjalin kerja sama internasional untuk mengatasi keterbatasan kapasitas medis dalam negeri. Dalam konteks ini, China muncul sebagai mitra strategis utama karena memiliki kemampuan produksi vaksin dan alat kesehatan dalam skala besar. Kerja sama bilateral ini dimulai dengan pengiriman bantuan alat medis pada Maret 2020 dan berlanjut dengan pengadaan vaksin Sinovac dan Sinopharm, termasuk bahan baku (bulk vaccine) yang digunakan untuk mendukung program vaksinasi nasional. Melalui diplomasi yang intensif dan terkoordinasi, Indonesia berhasil memperkuat kapasitas penanganan pandemi serta menjaga hubungan bilateral yang saling menguntungkan dengan China (Yahya and Simatupang 2023).

Pada bab tiga, penulis akan menganalisis menggunakan pendekatan *Conducting Global Health Negotiation* pada Chapter 12 dalam buku yang berjudul *a Guide to Global Health Diplomacy* karya Ilona Kickbusch, Haik Nikogosian, Michel Kazatchkine, Mihály Kökény. Pada Chapter 12 *Conducting Global Health Negotiation* terdapat elemen *Negotiation Tactics and Conflict*

Resolution, elemen tersebut akan digunakan sebagai variabel analisis. Penelitian ini difokuskan pada penerapan perspektif *Policy Type Tactics (Integrative Bargaining)* dengan enam elemen yang relevan, yaitu *Identifying Interests, People, Alternatives, Options, Commitments*, dan *Communication* (Kickbusch Ilona et al. 2021). Pada bab 3 ini tidak membahas elemen *Criteria/legitimacy* dinilai kurang relevan karena proses negosiasi antara Indonesia dan China tidak berfokus pada perumusan tolak ukur objektif baru, melainkan mengikuti standar internasional yang telah ada. Kedua negara telah menyepakati penggunaan pedoman *World Health Organization (WHO)* serta standar keamanan dan efikasi vaksin yang diatur melalui koordinasi antara BPOM RI dan *National Medical Products Administration (NMPA)* China. Dengan demikian, *Criteria/legitimacy* tidak menjadi aspek perundingan aktif, tetapi berfungsi sebagai acuan teknis yang telah diterima bersama sejak awal kerja sama.

Melalui penerapan *Negotiation Tactics* yang sistematis, diplomasi kesehatan Indonesia berhasil memastikan pengadaan jutaan dosis vaksin Sinovac serta bahan baku untuk produksi lokal melalui kerja sama antara PT Bio Farma dan Sinovac Biotech. Proses ini tidak hanya berfokus pada aspek pengadaan vaksin, tetapi juga mencakup kerja sama dalam transfer teknologi, riset klinis, dan peningkatan kapasitas produksi nasional. Dengan demikian, Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan China selama pandemi tidak sekadar menjadi respons terhadap krisis kesehatan global, melainkan juga strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian industri farmasi dan ketahanan kesehatan nasional. Keberhasilan ini mencerminkan penerapan *Negotiation Tactics* yang efektif, di mana kepentingan

nasional dikelola melalui pendekatan diplomasi yang adaptif, integratif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

3.1 Analisis Elemen *Identifying Interests* dalam Strategi Negosiasi Diplomasi Kesehatan Indonesia-China

Pandemi Covid-19 mendorong negara-negara untuk memprioritaskan kerja sama internasional di bidang kesehatan untuk memenuhi kebutuhan domestik yang mendesak. Pada konteks ini, Indonesia dengan China menjalin kerja sama strategi terkait vaksin dan alat kesehatan. Pendekatan ini dapat dianalisis melalui teori *Negotiation Tactics*, khususnya elemen *Identifying Interests*, yang menekankan pentingnya pemahaman mendalam atas kepentingan masing-masing pihak sebelum memasuki tahap negosiasi (Kickbusch Ilona et al. 2021).

Pada elemen *Identifying Interests* memungkinkan kedua negara untuk mengklasifikasi kebutuhan utama dan tujuan strategis, bukan sekedar posisi formal dalam perundingan. Hal ini penting karena negosiasi yang efektif membutuhkan pemahaman atas kepentingan yang saling melengkapi, sehingga hasilnya bersifat integratif dan menguntungkan kedua pihak (Kickbusch et al. 2021). Pada konteks vaksinasi Covid-19, Indonesia berfokus pada pemenuhan pasokan vaksin secara cepat dan merata, sementara China menekankan diplomasi kesehatan sebagai sarana memperkuat pengaruh globalnya.

Indonesia menempatkan pemenuhan vaksin Covid-19 sebagai prioritas nasional. Pemerintah membentuk tim lintas kementerian, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan, untuk menjamin akses terhadap vaksin asing sekaligus memperkuat kapasitas produksi dalam negeri melalui Bio Farma (Kementerian Sekretariat Negara 2020). Salah satu kebijakan kunci adalah kerja

sama dengan perusahaan China yaitu Sinovac Biotech., untuk pengadaan dan produksi vaksin, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/9860/2020, mengatur jenis vaksin yang dapat digunakan di Indonesia (Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2020).

Selain vaksin, Indonesia juga menerapkan kebijakan untuk mendukung impor alat kesehatan, termasuk ventilator, vaksin, dan reagen PCR, melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.04/2020, yang memberikan keringanan bea masuk dan PPN (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2020). Kebijakan ini menegaskan bahwa Diplomasi Kesehatan Indonesia tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi juga terkait ekonomi dan ketahanan nasional (Margono et al. 2021). Dengan adanya kebijakan ini, proses negosiasi dengan China menjadi lebih jelas karena tujuan Indonesia dapat dipenuhi secara sistematis.

Di sisi lain, kepentingan China dalam Diplomasi Kesehatan bersifat strategis dan multidimensional. Melalui inisiatif *Health Silk Road* yang menjadi bagian dari *Belt and Road Initiative*, China ingin memperkuat citra globalnya dalam bidang kesehatan dan memperluas jaringan kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Strategi ini tidak hanya meningkatkan pengaruh politik China, tetapi juga mendukung ekspansi ekonomi industri farmasinya dan menciptakan peluang kerja sama riset dan transfer teknologi (Mei 2023).

Identifikasi kepentingan kedua negara menunjukkan bahwa ada titik temu antara kebutuhan domestik Indonesia dan tujuan geopolitik China. Indonesia memerlukan akses cepat terhadap vaksin dan alat kesehatan, sedangkan China

ingin memperluas pengaruh diplomatik sekaligus membangun reputasi sebagai mitra kesehatan global. Kesadaran atas kepentingan masing-masing inilah yang memungkinkan negosiasi dilakukan secara perspektif *Policy Type Tactics (Integrative Bargaining)*, yaitu solusi yang dihasilkan menguntungkan kedua pihak (Kickbusch Ilona et al. 2021).

Dalam praktiknya, kerja sama tersebut menghasilkan berbagai kebijakan konkrit, seperti pengiriman vaksin Sinovac ke Indonesia, pendukungnya terhadap produksi domestik melalui Bio Farma, dan kerja sama uji klinis di Bandung (Kementerian Sekretariat Negara 2020). Berdasarkan penerapan elemen *Identifying Interests* dari teori *Negotiation Tactics* dalam Diplomasi Kesehatan berperspektif *Policy Type Tactics (Integrative Bargaining)* terbukti relevan untuk menjelaskan keberhasilan Diplomasi Kesehatan antara Indonesia dengan China. Identifikasi kepentingan memungkinkan kedua negara menemukan kesamaan tujuan, mengubah kebutuhan masing-masing menjadi kebijakan yang saling mendukung, dan membangun kerja sama yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Kerja sama ini menunjukkan bahwa pemahaman mendalam atas kepentingan nasional menjadi pondasi penting dalam Diplomasi Kesehatan global, khususnya dalam konteks pandemi Covid-19.

3.2 Analisis Elemen *People* dalam *Negotiation Tactics* Diplomasi Kesehatan Indonesia-China

Dalam penelitian ini jika menggunakan pendekatan *Negotiation Tactics*, terdapat elemen *People*, dalam hal ini, yang menjadi aktor *People* dalam Diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia adalah

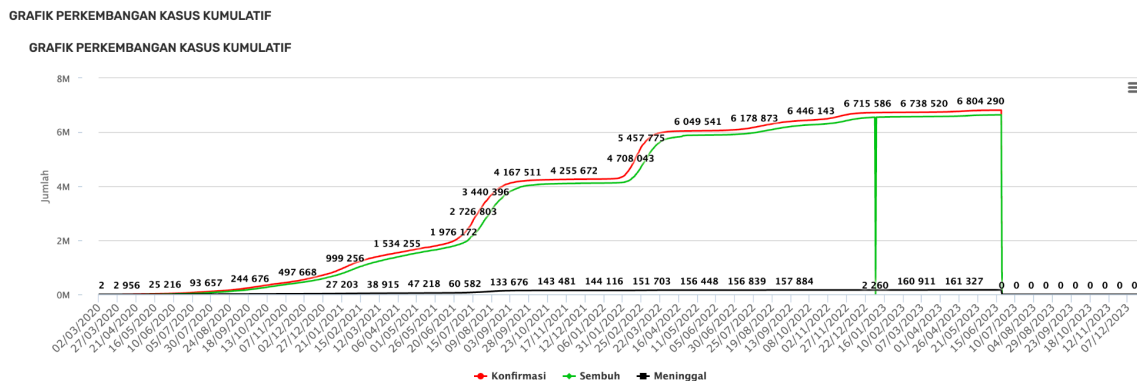
Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi yang menjadi kunci utama penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Sejak tahun 2020, Menlu Retno L.P. Marsudi bersama sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja ikut serta dalam mengamankan pasokan vaksin Covid-19 di Indonesia. Pasokan vaksin Covid-19 tidak hanya muncul dari sisi komersial, namun juga dalam sisi bilateral dan multilateral melalui Covax.

Menteri Luar Negeri Indonesia tentunya berperan penting sebagai aktor Diplomasi Kesehatan Indonesia. Menlu Retno L.P. Marsudi pada tahun 2021 berkomunikasi melalui panggilan telepon dengan Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, kedua perwakilan negara ini membahas kerja sama berkelanjutan antara Indonesia dengan China dalam bidang kesehatan. Menlu RI Retno L.P. Marsudi juga terpilih menjadi salah satu *co chair COVAX AMC engagement group* mewakili Indonesia sebagai negara berkembang. Tentunya posisi ini menguntungkan Indonesia sebagai negara yang besar dalam dinamika distribusi vaksin secara global. Dengan peran kunci dan upaya Diplomasi Kesehatan melalui Menlu RI terhadap China, posisi Menlu sangat strategis dan sangat kuat sebagai aktor *people* yang berkontribusi besar dalam Diplomasi Kesehatan Indonesia terhadap China (Sorongan 2021).

Bio Farma memberikan kontribusi besar dalam Diplomasi Kesehatan dan pemulihan global melalui vaksin Covid-19 IndoVac. Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi memaparkan capaian Diplomasi Indonesia dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM), termasuk peluncuran IndoVac oleh Presiden Joko Widodo tahun 2022, hasil kolaborasi Bio Farma dengan *Baylor College of*

Medicine, Amerika Serikat, serta dukungan transfer teknologi mRNA dari WHO. Vaksin ini telah memperoleh *Use Emergency Authorization* (EUA) dari BPOM pada 28 September 2022, sedang diajukan untuk *Emergency Use Listing* (EUL) WHO, dan mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan BPJPH, memastikan keamanan, kepatuhan syariah, dan kredibilitas internasional. Selama pandemi, Diplomasi Kesehatan memungkinkan Indonesia memperoleh 516.851.745 dosis vaksin, termasuk 137 juta dosis melalui kerja sama bilateral dan multilateral, serta menyalurkan vaksin ke 146 negara, dengan 103 juta dosis masuk ke Indonesia. IndoVac dapat digunakan untuk vaksinasi primer dan booster bagi dewasa (18+), remaja 12–17 tahun, dan anak-anak di bawah 12 tahun, dengan efektivitas di atas 80% serta tingkat kandungan dalam negeri sekitar 90% (Bio Farma 2023).

Grafik 2. Pemantauan Kasus Covid-19 Indonesia



Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Program vaksinasi yang telah menjangkau lebih dari 80% masyarakat Indonesia menjadi faktor utama dalam menekan angka kematian akibat Covid-19. Vaksin Sinovac yang digunakan terbukti efektif melindungi masyarakat dari gejala berat, sehingga meskipun terjadi kenaikan kasus di beberapa negara tetangga, Indonesia relatif lebih siap menghadapi situasi tersebut tanpa perlu

panik atau melakukan vaksinasi ulang yang belum terbukti secara ilmiah (Kemenkes 2025).

Sebagai respons terhadap kenaikan kasus tersebut, Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan “Surat Edaran Dirjen Penanggulangan Penyakit” yang mengatur peningkatan kewaspadaan di seluruh fasilitas kesehatan dan dinas kesehatan. Surat edaran ini bertujuan memastikan kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor dalam mendeteksi dan merespons potensi wabah, sehingga keamanan kesehatan nasional tetap terjaga. Namun, pemerintah tetap mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah dan terus mematuhi protokol kesehatan serta meningkatkan kesiapsiagaan nasional agar risiko penyebaran dapat dicegah secara optimal (Jala Hoaks 2025).

Pada 28 April, Retno L.P. Marsudi memberikan ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62, menekankan bahwa diplomasi harus adaptif, inovatif, dan berani mengambil keputusan serta risiko di masa pandemi yang sulit. Awal tahun 2021 sempat muncul harapan pandemi akan cepat mereda karena tersedianya vaksin dan penurunan kasus global. Namun, jumlah infeksi global meningkat selama 9 minggu terakhir dan muncul varian baru yang lebih menular, sehingga beberapa negara menahan ekspor vaksin dan obat-obatan, yang menyebabkan keterlambatan pasokan ke Indonesia. Retno L.P. Marsudi menegaskan bahwa Indonesia merespons dengan cepat, menugaskan pejabat tinggi dan kementerian terkait untuk membuka akses vaksin sejak awal pandemi, meratakan distribusi, dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Indonesia juga berperan aktif dalam memperjuangkan kesetaraan akses vaksin global, termasuk melalui posisi Retno L.P. Marsudi sebagai *Co-Chair COVAX AMC Engagement*

Group, forum multilateral untuk pengadaan dan distribusi vaksin bagi negara-negara AMC. Hingga saat ceramah, 67 juta dosis vaksin telah tiba di Indonesia, dengan tambahan 6 juta dosis diharapkan segera (Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia 2021).

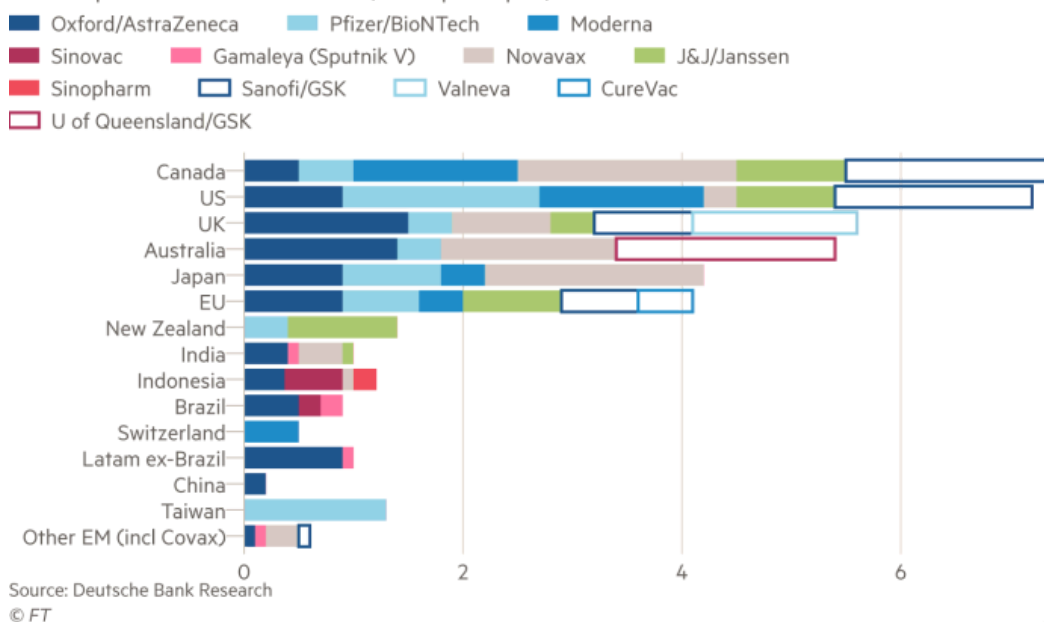
3.3 Analisis Elemen *Alternatives* dalam *Negotiation Tactics* Pengembangan Kebijakan Kesehatan antara Indonesia dan China

Elemen *Alternatives* dalam konteks negosiasi menggambarkan sejauh mana suatu pihak memiliki pilihan lain apabila kesepakatan yang diinginkan tidak tercapai. Dalam Diplomasi Kesehatan antara Indonesia dan China selama pandemi Covid-19, *Alternatives* berperan penting dalam menentukan posisi tawar Indonesia. Keterbatasan kapasitas domestik dalam riset dan produksi vaksin membuat Indonesia harus mengandalkan kerja sama internasional untuk menjamin ketersediaan vaksin dan alat kesehatan. Pada awal pandemi, negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri melalui kebijakan nasionalisme vaksin, sehingga Indonesia tidak memiliki banyak opsi untuk mendapatkan vaksin dari Barat. Dalam kondisi tersebut, China muncul sebagai mitra alternatif paling realistis karena mampu menyediakan vaksin dalam waktu cepat dan dalam jumlah besar (Unpad.ac.id 2020).

Grafik 3. Perjanjian Pasokan Vaksin Bilateral dengan Produsen

Many advanced economies have signed bilateral vaccine supply agreements with manufacturers

Vaccine pre-orders to December 1 (doses per capita)



Sumber: Igj (2020)

Pengakuan terhadap teknologi vaksin China oleh Indonesia juga dapat dipahami melalui elemen “*Alternatives*” dalam kerangka *Negotiation Tactics (Integrative Bargaining)*. Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi keterbatasan akses terhadap vaksin dari negara Barat akibat kebijakan nasionalisme vaksin dan pembatasan ekspor, sehingga kerja sama dengan China menjadi alternatif strategis yang realistis dan menguntungkan. Langkah ini bukan hanya upaya teknis untuk memperoleh pasokan vaksin, tetapi juga keputusan diplomatik yang mencerminkan kemandirian dan fleksibilitas negosiasi Indonesia di tengah tekanan geopolitik global. Menurut *Indonesia for Global Justice*, pilihan Indonesia menjalin kemitraan dengan China menunjukkan pendekatan diplomasi kesehatan yang berkeadilan bahwa Indonesia merupakan negara berkembang

menggunakan hubungan bilateral sebagai instrumen untuk memperjuangkan akses vaksin yang setara dan kedaulatan kesehatan nasional (Igj 2020).

Kerja sama vaksin dengan China tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga strategis. Indonesia memanfaatkan peluang ini untuk mengakui dan mengadopsi teknologi vaksin yang dikembangkan oleh China, seperti Sinovac. Pengakuan terhadap teknologi vaksin China memiliki nilai diplomatik yang besar karena memperkuat legitimasi kerja sama kedua negara di tengah keraguan sebagian negara Barat terhadap efektivitas vaksin tersebut. Lebih dari itu, langkah ini membuka peluang transfer teknologi yang memungkinkan Indonesia untuk memproduksi vaksin secara domestik melalui PT Bio Farma. Transfer teknologi ini menjadi bentuk konkret dari penerapan *Alternatives* yang bukan hanya bersifat jangka pendek (mendapat vaksin), tetapi juga jangka panjang (membangun kapasitas produksi nasional) (Triwibowo and Martha 2021).

Dalam proses negosiasi, *Alternatives* juga memperlihatkan strategi Indonesia untuk tidak bergantung sepenuhnya pada satu sumber. Walaupun China menjadi mitra utama, Indonesia tetap menjajaki kerja sama dengan pihak lain seperti *Covax Facility* dan beberapa produsen vaksin global, guna menjaga posisi tawar dan menghindari ketergantungan penuh. Sikap ini mencerminkan strategi diplomasi yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika geopolitik global. Dengan kata lain, Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan pihak mana pun yang mampu memenuhi kebutuhan nasional, namun tetap menempatkan kepentingan domestik sebagai prioritas utama. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa elemen *Alternatives* digunakan bukan sekadar untuk

mencari substitusi, tetapi untuk memperkuat daya tawar dalam menghadapi mitra negosiasi utama, yakni China. Selain manfaat jangka pendek berupa pasokan vaksin, kerja sama dengan China membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksi vaksin di dalam negeri. Melalui transfer teknologi dan dukungan dari China, Indonesia dapat memperkuat kemampuan riset dan produksi vaksin secara mandiri. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan impor vaksin di masa depan dan meningkatkan kesiapan nasional menghadapi pandemi atau krisis kesehatan lainnya. Pembangunan fasilitas produksi vaksin domestik juga akan memberikan nilai tambah ekonomi dan memperkuat industri farmasi nasional (Humas 2021a)

Elemen *Alternatives* menunjukkan fleksibilitas Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang kompleks. Lebih jauh, transfer teknologi dari China tidak hanya terbatas pada produksi vaksin, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan infrastruktur riset di Indonesia. Hal ini mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas riset vaksinologi di dalam negeri sehingga Indonesia dapat menjadi pemain yang lebih mandiri dan inovatif dalam bidang bioteknologi dan kesehatan. Peningkatan kapasitas ini akan sangat bermanfaat untuk menghadapi tantangan kesehatan di masa depan (Amankwah-Amoah and Hinson 2022).

Diplomasi vaksin yang dijalankan Indonesia juga sejalan dengan upaya China dalam memperluas pengaruhnya melalui inisiatif seperti BRI (*Belt and Road Initiative*) dan *Health Silk Road*. Melalui kerja sama kesehatan ini, China memperkuat hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sekaligus memperkuat posisinya sebagai kekuatan global dalam bidang

kesehatan dan teknologi. Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi kepentingan nasional (Chow-Bing 2020).

Secara keseluruhan, elemen *Alternatives* dalam strategi Indonesia pada kasus ini menempatkan kebutuhan strategis nasional sebagai prioritas utama. Indonesia berupaya memastikan ketersediaan vaksin yang aman dan efektif bagi masyarakat, yaitu mengakui dan memanfaatkan teknologi vaksin China (Amankwah-Amoah and Hinson 2022). Langkah ini tidak hanya mempercepat penanganan pandemi, tetapi juga membuka jalan bagi kemandirian teknologi kesehatan nasional di masa depan. Penekanan dalam kasus ini harus dipahami secara bertingkat: pertama, kebutuhan mendesak akan vaksin yang dapat melindungi masyarakat; kedua, pengakuan dan transfer teknologi vaksin dari China sebagai dasar pengembangan kapasitas domestik; ketiga, diplomasi kesehatan yang memperkuat hubungan bilateral dan posisi geopolitik Indonesia; dan keempat, pembangunan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur riset untuk kemandirian jangka panjang. Pendekatan ini mencerminkan kebijakan yang realistis dan visioner dalam menghadapi tantangan pandemi global dan dinamika geopolitik yang kompleks (The Jakarta Post 2021).

Menghadapi pandemi Covid-19, Indonesia berusaha mendekatkan diri dengan China mengingat posisinya sebagai kekuatan regional yang dominan di Asia Tenggara sekaligus produsen vaksin terbesar di dunia. Pada saat yang sama, kebijakan proteksionis "*America First*" yang diterapkan oleh pemerintahan Amerika Serikat di bawah Donald Trump membatasi akses Indonesia terhadap vaksin dan alat kesehatan buatan Amerika, sehingga Indonesia harus mencari alternatif lain. China menawarkan akses vaksin yang lebih cepat dan mudah,

berbeda dengan pendekatan Amerika yang lebih bersifat global dan kompetitif melalui perusahaan farmasi seperti pfizer dan moderna. Kedekatan geografis dan hubungan politik-ekonomi yang erat membuat kerja sama dengan China lebih pragmatis dan dapat diterima oleh Indonesia, terutama mengingat kebutuhan mendesak akan vaksin. Dengan demikian, Indonesia memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat penanganan pandemi sekaligus menjaga kepentingan nasionalnya (Bbc News Indonesia 2020a).

Akses terhadap vaksin dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, khususnya vaksin AstraZeneca yang diproduksi melalui kerja sama dengan perusahaan farmasi Eropa di Inggris, menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Proses distribusi vaksin ini melibatkan berbagai badan pengawas dan jalur distribusi multinasional yang rumit, serta diatur oleh regulasi ketat dan prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri di negara-negara produsen. Kondisi tersebut menyebabkan negara berkembang seperti Indonesia mengalami kesulitan dalam memperoleh vaksin dalam jumlah besar dan secara cepat. Hal ini mendorong Indonesia untuk mencari alternatif sumber vaksin yang lebih fleksibel dan dapat memenuhi kebutuhan nasional secara lebih efektif (Matakena and Peilouw 2021).

Indonesia sebagai negara *middle power* memiliki posisi strategis yang memungkinkan untuk tidak memihak secara eksklusif kepada satu negara dalam pengadaan vaksin Covid-19, termasuk dari Inggris, China, dan Amerika Serikat. Hal ini tercermin dari strategi diplomasi vaksin Indonesia yang bersifat pragmatis dan multilateral, dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan domestik dan menjaga hubungan baik dengan berbagai negara sekaligus. Vaksin Sinovac dipilih karena menawarkan kemudahan akses, harga yang terjangkau, serta dukungan

yang sesuai dengan kondisi nasional. Pemerintah Indonesia telah menerima jutaan dosis vaksin Sinovac dan bahan baku untuk produksi vaksin dalam negeri yang dilakukan bersama PT Bio Farma. Pilihan ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk mendapatkan vaksin yang efektif dan dapat didistribusikan secara luas, mengingat tantangan logistik dan biaya yang lebih rendah dibandingkan vaksin lain seperti Pfizer dan Moderna. Pendekatan ini dianggap lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan nasional dibandingkan dengan opsi vaksin dari Amerika Serikat dan Uni Eropa yang memiliki regulasi dan distribusi lebih kompleks (Hanafi 2021).

Secara keseluruhan, penerapan elemen *Alternatives* dalam negosiasi Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan China menunjukkan kemampuan Indonesia untuk menavigasi keterbatasan menjadi kekuatan strategis. Dengan memilih mitra yang tepat, mengelola ketergantungan, serta mengubah hubungan transaksional menjadi kolaboratif, Indonesia berhasil memanfaatkan Diplomasi Kesehatan untuk mencapai tujuan nasional jangka pendek dan jangka panjang. Elemen *Alternatives* menjadi kunci bagi Indonesia dalam memperkuat kedaulatan kesehatan nasional, sekaligus mempertegas perannya sebagai *middle power* yang mampu bersikap pragmatis, adaptif, dan visioner dalam menghadapi tantangan global (Liur, Simanjuntak, and Umbu 2024).

3.4 Analisis Elemen *Options* dalam Solusi Diplomasi Kesehatan Indonesia-China

Tahun 2020-2021 ditandai kemitraan Bio Farma–Sinovac untuk pasokan bulk dan skema *fill-finish Corona Vac*. Penandatanganan ini, disaksikan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI Ibu Retno dan Menteri BUMN sekaligus Ketua

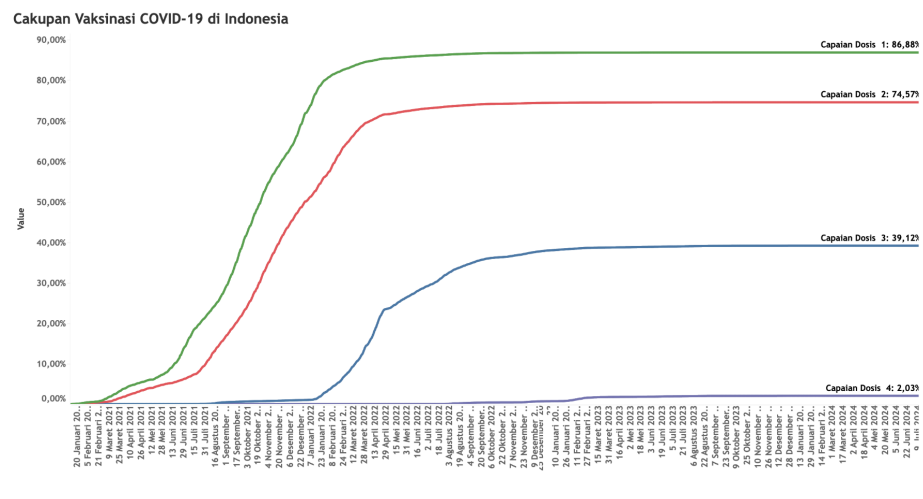
Pelaksana KPEN Bapak Erick Thohir. Selanjutnya kami (Bio Farma) menantikan kiriman 10 juta dosis *bulk* vaksin Covid-19 pertama di bulan November 2020, dan pada Desember 2020 akan datang 10 juta dosis *bulk* berikutnya. Kemudian pada bulan Januari 2021 hingga Maret 2021 akan datang 10 juta dosis *bulk* vaksin Covid-19 setiap bulannya, sehingga total yang akan diterima Bio Farma sampai dengan Maret 2021 adalah sebanyak 50 juta *bulk* vaksin Covid-19. Pengaturan ini mencerminkan paket “*win-win*” melalui akses cepat, penjaminan pasokan, serta elemen transfer pengetahuan atau teknologi dalam industri vaksin nasional (Bio Farma 2020).

Kementerian menegaskan skema prioritas suplai hingga akhir 2021 serta pembagian pengiriman bulanan yang memperkuat perencanaan program imunisasi dan operasi logistik dalam negeri, sekaligus memperdalam hubungan bilateral melalui saluran *Government to Government*, dan *Business to Business* yang konkret. Pernyataan resmi dan rilis perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara membuktikan bahwa opsi kebijakan dirancang untuk sekaligus memenuhi kebutuhan domestik dan memperkuat jejaring internasional (Bio Farma 2020).

Memasuki tahun 2022–2023, kerja sama beralih dari respons darurat menuju ketahanan kesehatan dan transformasi industri: penandatanganan *Plan of Action* (PoA) 2023 yang menurunkan MoU 2022 menempatkan kesehatan sebagai instrumen penguatan kemandirian bioteknologi obat, vaksin, diagnostik serta penguatan konektivitas aktor publik swasta lintas negara. Pergeseran ini menegaskan evolusi opsi kebijakan dari “akses darurat” ke “kapasitas jangka panjang” sebagai bentuk manfaat timbal balik yang berkelanjutan (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2023).

Elemen *Options* realistik berbasis curah pendapat kolektif dalam diplomasi kesehatan menurut Kickbusch menuntut desain paket kebijakan yang dapat dieksekusi, terukur, dan mengintegrasikan kepentingan berlapis secara transparan. Pengalaman Indonesia dengan China tahun 2020–2023 memperlihatkan lintasan lengkap dari respons darurat ke transformasi kapasitas, dan menyediakan dasar empirik kuat untuk merumuskan opsi kebijakan saling menguntungkan yang berorientasi pada ketahanan kesehatan dan relasi bilateral yang lebih dalam (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2023).

Grafik 4. Vaksinasi Covid-19 di Indonesia



Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Dukungan yang diterima dalam program vaksinasi nasional telah memungkinkan Indonesia untuk menjadi salah satu negara dengan jumlah vaksinasi terbanyak di dunia, menempati posisi keempat secara global. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional Asia Tenggara, tetapi juga meningkatkan hubungan perdagangan dan diplomatik dengan mitra strategis. Pada tahun 2020-2023, Diplomasi Kesehatan terus berkembang melalui berbagai inisiatif, termasuk bantuan bahan baku vaksin dan

pengembangan fasilitas produksi vaksin dalam negeri dalam skala besar. Dengan demikian, Diplomasi Kesehatan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang strategis untuk memperkuat kerja sama bilateral dan kapasitas nasional dalam menghadapi krisis kesehatan global. Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan China dalam menghadapi Covid-19 merupakan bukti nyata mengenai cara negara berkembang dapat memanfaatkan kerja sama dengan negara utama penghasil vaksin untuk menangani krisis di bidang kesehatan (Widyawati 2022).

Pada tahun 2022-2023, Retno L.P. Marsudi sebagai *Minister for Foreign for Foreign Affairs the Republic of Indonesia* memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keberlanjutan *Vaccine Diplomacy* yang telah dijalankan sekarang awal pandemi Covid-19. Berdasarkan Yahya dan Simatupang, Retno L.P. Marsudi menjadi aktor diplomatik yang sebelumnya menginisiasi bilateral *engagement* antara Indonesia dan China dalam upaya pengadaan vaksin dan alat kesehatan. Memasuki tahun-tahun berikutnya, perannya bergeser pada penguatan dan konsolidasi hasil diplomatik tersebut. Bertugas memastikan bahwa kerja sama bilateral tetap berjalan efektif, termasuk dalam hal distribusi vaksin, *dose-sharing mechanism*, dan akses bahan baku untuk produksi vaksin nasional. Tanggung jawab ini menunjukkan keberlanjutan fungsi Diplomasi Kesehatan Indonesia (Yahya and Simatupang 2023)

Selanjutnya, Retno Marsudi melaksanakan fungsi *policy coordination* dan *strategic oversight* terhadap implementasi hasil kerja sama Indonesia–China. Ia memastikan kerja sama vaksin tidak hanya berorientasi pada penanganan pandemi, tetapi juga mendukung transformasi Indonesia sebagai *regional vaccine manufacturing hub* di kawasan Asia Tenggara. Dalam kerangka *soft power*

diplomacy, upaya Retno merefleksikan penggunaan instrumen kesehatan sebagai sarana memperkuat *national capacity* dan membangun citra positif Indonesia di mata dunia. Perannya selama tahun 2022–2023 juga mencerminkan kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia yang berorientasi pada kepentingan nasional (*national interest*) dan solidaritas antar-negara berkembang (*South–South cooperation*) (Yahya and Simatupang 2023).

Selain itu, Retno Marsudi turut menjaga keseimbangan posisi Indonesia di ranah geopolitik melalui prinsip *free and active foreign policy*. Dalam konteks *bilateral relations* dengan China, ia memastikan bahwa kerja sama vaksin tidak menimbulkan *dependency politics* yang dapat menggeser posisi Indonesia dalam isu strategis kawasan seperti Laut Cina Selatan. Melalui pendekatan diplomasi yang inklusif dan berbasis *mutual trust and benefit*, Retno berhasil mempertahankan citra Indonesia sebagai *reliable partner* sekaligus negara berdaulat yang konsisten menempatkan kesehatan global sebagai bagian dari *comprehensive national security*. Dengan demikian, tugas dan perannya pada 2022–2023 merupakan kelanjutan dari keberhasilan *vaccine diplomacy* sebelumnya serta wujud konkret penerapan *soft power Indonesia* di bidang kesehatan global (Yahya and Simatupang 2023)

3.5 Implementasi Elemen *Commitments* dalam *Negotiation Tactics* Pelaksanaan Diplomasi Kesehatan Indonesia-China

Pada teori *Negotiation Tactics* dalam Diplomasi Kesehatan karya Ilona Kickbusch, Haik Nikogosian, Michel Kazatchkine, Mihály Kőkény yang berfokus pada penerapan perspektif *Policy Type Tactics (Integrative*

Bargaining), komitmen dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama yang lahir dari kepentingan yang saling menguntungkan, bukan dari tekanan sepihak (Kickbusch et al. 2021). Elemen *Commitment* menekankan pentingnya realisasi konkret dari hasil negosiasi agar tidak berhenti pada wacana. Pada konteks Diplomasi Kesehatan Indonesia dan China selama pandemi Covid-19, komitmen diwujudkan melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai pasokan vaksin dan alat kesehatan. Kesepakatan tersebut tidak hanya menandai keberhasilan diplomasi, tetapi juga memperlihatkan kedalaman hubungan strategis kedua negara (Suhita, Ma'rifat, and Ramadina 2021)..

Komitmen dalam menggambarkan ketersediaan kedua negara untuk menindaklanjuti hasil negosiasi menjadi langkah nyata yang terukur. Pada hubungan Indonesia dengan China, komitmen diwujudkan melalui berbagai kesepakatan yang memperkuat kerja sama di bidang vaksin dan alat kesehatan selama pandemi Covid-19. Komitmen tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan keberlanjutan kerja sama. Pada elemen *Commitment* menunjukkan bahwa Diplomasi Kesehatan bukan sekedar pertukaran kepentingan, melainkan bentuk kepercayaan strategis antar negara. Dengan demikian, elemen *Commitment* berperan penting dalam menjaga stabilitas hasil negosiasi bilateral (Liu Liangtao, Huang, and Jin 2022).

Pelaksanaan komitmen dimulai dari kesepakatan resmi yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan pemerintah China. Menjadi dasar hukum yang mengatur peran, tanggung jawab, dan mekanisme implementasi kerja sama. Penandatanganan

Memorandum of Understanding tersebut menunjukkan bahwa kedua pihak memiliki komitmen hukum yang mengikat untuk mendukung pengadaan vaksin dan alat kesehatan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa negosiasi diplomatik tidak berhenti pada kesepakatan verbal semata, melainkan dilanjutkan dengan tindakan konkret. Kesepakatan tersebut menjadi pondasi dalam pelaksanaan kerja sama bilateral di bidang kesehatan (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2023).

Indonesia menunjukkan komitmen melalui penyediaan sumber daya manusia dan anggaran untuk mempercepat distribusi vaksin dan alat kesehatan hasil kerja sama dengan China. Pemerintah memastikan setiap tahap pengadaan berjalan sesuai prosedur dan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Langkah ini mencerminkan akuntabilitas yang menjadi bagian dari elemen Commitment dalam negosiasi. Adanya pengawasan dan transparansi, kerja sama kesehatan dapat terlaksana tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan. Sikap ini memperlihatkan bahwa Indonesia serius dalam menjaga keberhasilan implementasi hasil Diplomasi Kesehatan. Implementasi komitmen ini tidak hanya berupa transfer vaksin, tetapi juga kerja sama berupa transfer vaksin, tetapi juga kerja sama teknis untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia melakukan koordinasi dengan *National Medical Products Administration* (NMPA) China dalam proses sertifikat dan pengawasan mutu. Langkah tersebut mencerminkan bentuk komitmen yang mendukung kebijakan kesehatan bilateral (Badan Pom, n.d.).

Sejak awal pandemi 2020, BPOM menuntut transparansi penuh dari Sinovac terkait data *Clinical Trial Phase III* sebelum memberikan izin edar

darurat (Risky Mohammad Nugraha 2021). *National Medical Products Administration* merespon dengan memberikan akses terbatas terhadap hasil uji klinis di China melalui mekanisme *Data-sharing Agreement* antar regulator (Badan Pom, n.d.). Proses tersebut mencerminkan bentuk komitmen dalam perspektif *Policy Type Tactics (Integrative Bargaining)*, yaitu kedua negara saling membuka akses informasi sebagai dasar kepercayaan bersama. Salah satu praktik negosiasi yang mengedepankan kepentingan bersama dalam konteks keamanan kesehatan (Kickbusch et al. 2021).

Negosiasi antara BPOM dan *National Medical Products Administration* tidak berlangsung satu arah. Pada beberapa pertemuan virtual yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri dan *World Health Organization* pada pertengahan 2021, BPOM menegosiasikan agar sebagian proses pengujian bahan baku vaksin dapat dilakukan di Indonesia, bukan sepenuhnya di China. Tuntutan tersebut diterima secara bertahap oleh *National Medical Products Administration* setelah adanya jaminan bahwa Indonesia menerapkan standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang setara dengan standar *World Health Organization* (Badan Pom 2022).

BPOM menunjukkan komitmennya dengan mempercepat pembentukan *Task Force Vaksin* yang beranggotakan ilmuwan dari Lembaga Eijkman dan Bio Farma untuk menjamin proses verifikasi berjalan paralel dengan persetujuan NMPA. Langkah tersebut membuat proses *Emergency Use Authorization* (EUA) berjalan lebih efisien tanpa mengorbankan aspek keamanan publik (Sekretaris Kabinet RI 2021). Pada perspektif *Policy Type Tactics (Integrative Bargaining)* yaitu upaya kedua pihak untuk menyelaraskan kebijakan tanpa menciptakan ketegangan diplomatik. Tahun 2022, kerja sama semakin konkret melalui

Memorandum of Understanding on Pharmaceutical Regulatory Cooperation, yang mencakup pertukaran data farmakovigilans, standarisasi bahan baku vaksin (Badan Pom, n.d.).

3.6 Penerapan Elemen *Communication* dalam Penguatan Koordinasi Diplomatik Indonesia-China

Komunikasi diplomatik antara Indonesia dengan China dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang memastikan keberlangsungan kerja sama kesehatan bilateral di tengah ketidakpastian. Proses komunikasi yang dilakukan tidak hanya berlangsung pada level politik, tetapi juga mencakup koordinasi teknis antar lembaga, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dan BPOM di Indonesia dengan *National Health Commission* (NHC) dan *National Medical Products Administration* (NMPA) di China. Melalui dialog diplomatik yang intens, kedua negara membangun kesepahaman terkait jadwal pengiriman vaksin, mekanisme transfer teknologi, dan standarisasi alat kesehatan (Antara News 2023). Komunikasi yang terbuka ini mencerminkan penerapan elemen *Communication* dalam teori *Negotiation Tactics* dalam Diplomasi Kesehatan yang berfokus pada penerapan perspektif *Policy Type Tactics (Integrative Bargaining)*, pertukaran informasi biasanya digunakan untuk membangun kepercayaan dan menyelaraskan kepentingan bersama, bukan untuk menegosiasikan kepentingan sepihak. Dengan demikian, komunikasi berperan sebagai instrumen strategis yang menghubungkan dimensi politik dalam Diplomasi Kesehatan bilateral (Kickbusch et al. 2021).

Komunikasi diplomatik antara Indonesia dengan China dalam diplomasi kesehatan selama pandemi Covid-19 menunjukkan pola komunikasi berlapis yang mengintegrasikan dimensi politik, teknis, dan distribusi sebagai satu kesatuan strategi negosiasi yang bersifat *Integrative Bargaining* (Kickbusch et al. 2021). Pada tingkat politik, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi dan Wang Yi berperan sebagai komunikator utama yang memastikan kejelasan pesan diplomatik dan komitmen kerja sama vaksin, melalui pertemuan virtual pada tahun 2020 yang menekankan kepercayaan dan solidaritas kesehatan antarnegara (Kompas.com 2020).

Pada tingkat teknis, BPOM RI dan *National Medical Products Administration* China menjalin komunikasi intensif melalui *Regulatory Dialogues* dan harmonisasi standar keamanan vaksin untuk mempercepat proses persetujuan izin edar, suatu bentuk komunikasi berbasis keilmuan yang memperkuat di bidang kesehatan (National Medical Products Administration 2021). Sementara itu, Bio Farma bersama Sinovac Biotech. menjalankan komunikasi ilmiah dan operasional yang menjembatani hasil riset klinis dengan kebutuhan logistik nasional, sehingga proses transfer teknologi dan produksi vaksin dapat berlangsung efisien tanpa mengorbankan kualitas (Sinovac 2020). Koordinasi komunikasi antara tiga level tersebut yaitu politik, regulatif, dan industri dilakukan melalui forum *Joint Working Group on Health Cooperation* (JWG) yang menjadi wadah sinkronisasi pesan antar aktor dan penyusunan langkah tindak lanjut bersama, mencerminkan praktik komunikasi diplomatik yang sistematis dan adaptif (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2023). Pola komunikasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan China tidak hanya

ditentukan oleh isi kesepakatan, tetapi oleh kemampuan tiap aktor menjaga konsistensi narasi dan kepercayaan melalui pertukaran informasi yang jujur, terbuka, dan berorientasi pada kemaslahatan publik kedua negara.

Pada diplomatik antara BPOM RI dan *National Medical Products Administration* China menjadi contoh konkret penerapan perspektif *Policy Type Tactics (Integrative Bargaining)* dalam Diplomasi Kesehatan. Sehingga dalam proses penilaian izin edar vaksin Sinovac pada tahun 2020-2021, BPOM tidak semerta-merta menerima hasil uji klinis dari China, tetapi menegosiasikan bentuk pertukaran data ilmiah dan audit fasilitas produksi secara terbuka (Sekretaris Kabinet RI 2021). Kedua lembaga mengatur pertemuan teknis reguler melalui jalur Diplomasi Kesehatan yang dimediasi oleh Kementerian Kesehatan RI dan Kedutaan Besar RI di Beijing, menunjukkan bahwa komunikasi bersifat horizontal (Badan Pom, n.d.). China melalui *National Medical Products Administration* bersedia membuka akses terhadap *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan laporan keamanan vaksin, sementara BPOM melakukan verifikasi data uji klinis tahap III yang dikerjakan bersama Bio Farma dan Universitas Padjajaran di Bandung (Sekretariat Kabinet RI 2020). Dengan demikian, Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan China bukan sekedar transaksi vaksin, tetapi hasil dari komunikasi regulatif yang berorientasi pada kepercayaan, validitas ilmiah, dan keuntungan bersama dalam tata kelola kesehatan publik.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan China dalam kebijakan impor vaksin dan alat kesehatan Covid-19 tahun 2020-2023 merupakan wujud respon strategis Indonesia menghadapi tantangan pandemi dan keterbatasan kapasitas domestik di sektor kesehatan. Diplomasi kesehatan antara Indonesia dan China selama pandemi Covid-19 menunjukkan penerapan strategi negosiasi yang berorientasi pada kepentingan bersama melalui perspektif *Policy Type Tactics (Integrative Bargaining)*. Kerja sama ini berhasil memastikan ketersediaan vaksin dan alat kesehatan pada masa krisis global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan Diplomasi Kesehatan internasional. Melalui pendekatan yang kolaboratif dan adaptif, Indonesia mampu mengubah keterbatasan sumber daya menjadi peluang strategis untuk memperluas jaringan kerja sama, mempercepat program vaksinasi nasional, serta meningkatkan kapasitas riset dan produksi vaksin dalam negeri.

Analisis terhadap enam elemen *Negotiation Tactics* yakni *Identifying Interests, People, Alternatives, Options, Commitments, dan Communication* menunjukkan bahwa keberhasilan Diplomasi Kesehatan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negosiasi formal, tetapi juga oleh sinergi antar aktor politik, regulator, dan industri. Indonesia mampu mengidentifikasi kepentingan nasional secara tepat, membangun hubungan interpersonal yang efektif, serta

memilih alternatif dan opsi kebijakan yang realistis di tengah dinamika geopolitik global. Komitmen yang kuat antara kedua negara juga tercermin dalam pelaksanaan kesepakatan, seperti uji klinis bersama, transfer teknologi, serta distribusi vaksin yang berkelanjutan. Komunikasi yang transparan dan berbasis ilmiah antar lembaga memperkuat kepercayaan timbal balik dan mengurangi potensi konflik diplomatik.

Terdapat *Negotiation Tactics* sebagai elemen Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan China dalam Kebijakan Impor Vaksin dan Alat Kesehatan Covid-19 Tahun 2020-2023. Pertama, analisis elemen *Identifying Interests* dalam strategi negosiasi Diplomasi Kesehatan Indonesia-China, menekankan pentingnya mengenali kepentingan utama masing-masing pihak sebelum proses negosiasi dimulai. Bagi Indonesia, prioritas utamanya adalah memperoleh vaksin dan alat kesehatan untuk menanggulangi pandemi secepat mungkin. Sementara bagi China, kerja sama ini menjadi sarana memperluas pengaruh globalnya di bidang kesehatan melalui diplomasi vaksin yang saling menguntungkan. Kedua, analisis elemen *People* dalam *Negotiation Tactics* Diplomasi Kesehatan Indonesia-China, berfokus pada peran aktor kunci yang menjalankan komunikasi dan koordinasi diplomatik. Menlu Retno Marsudi dan Wang Yi menjadi tokoh sentral dalam menjaga hubungan bilateral yang terbuka dan kooperatif selama pandemi. Keterlibatan mereka memperkuat kepercayaan politik dan memastikan negosiasi berjalan efektif tanpa menimbulkan ketegangan diplomatik. Ketiga, analisis elemen *Alternatives* dalam *Negotiation Tactics* pengembangan kebijakan kesehatan antara Indonesia dan China, menggambarkan kemampuan Indonesia dalam menentukan pilihan alternatif terbaik di tengah keterbatasan global. Ketika

negara-negara barat memprioritaskan kebutuhan domestik, Indonesia memilih China sebagai mitra strategis yang mampu menyediakan vaksin secara cepat dan terjangkau. Keputusan ini tidak hanya pragmatis tetapi juga memperkuat posisi tawar Indonesia di arena kesehatan internasional. Keempat, analisis elemen *Options* dalam solusi Diplomasi Kesehatan Indonesia-China, menunjukkan bagaimana kedua negara mengembangkan berbagai bentuk solusi kerja sama yang fleksibel dan saling menguntungkan. Indonesia dan China membangun kemitraan dalam transfer teknologi, riset bersama, dan produksi vaksin melalui Bio Farma Sinovac Biotech. Memperlihatkan orientasi jangka panjang terhadap penguatan kapasitas industri kesehatan nasional. Kelima, implementasi elemen *Commitments* dalam *Negotiation Tactics* pelaksanaan Diplomasi Kesehatan Indonesia-China, menegaskan pentingnya pelaksanaan konkret dari hasil negosiasi yang telah disepakati kedua negara. Komitmen diwujudkan melalui penandatanganan MoU, kerja sama teknis BPOM–NMPA, dan pengawasan mutu vaksin yang berkelanjutan. Konsistensi ini mencerminkan kepercayaan strategis dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan hubungan bilateral. Keenam, penerapan elemen *Communication* dalam penguatan koordinasi diplomatik Indonesia-China, menggambarkan bagaimana komunikasi yang terbuka dan berlapis menjadi fondasi keberhasilan Diplomasi Kesehatan. Pertukaran informasi antara Kemenlu, Kemenkes, BPOM, dan lembaga mitra di China menjaga transparansi proses dan mencegah kesalahpahaman diplomatik. Pola komunikasi horizontal ini memastikan setiap kebijakan dilaksanakan secara sinkron dan berorientasi pada kepentingan publik kedua negara.

Secara keseluruhan, Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan China dalam kebijakan impor vaksin dan alat kesehatan tahun 2020–2023 menjadi contoh nyata penerapan *Negotiation Tactics* dalam diplomasi global yang efektif dan berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya berhasil menjawab kebutuhan jangka pendek berupa ketersediaan vaksin dan alat kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan kapasitas nasional di bidang bioteknologi dan kesehatan. Melalui pendekatan negosiasi yang integratif, Indonesia mampu menjaga kedaulatan kesehatan nasional sekaligus memperkuat perannya sebagai *middle power* yang berpengaruh dalam tata kelola kesehatan global.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini sangat penting untuk mendalami bagaimana Diplomasi Kesehatan Indonesia dengan China dalam kebijakan impor vaksin dan alat kesehatan Covid-19 tahun 2020-2023. Menelaah strategi diplomasi vaksin, kolaborasi produksi, serta bantuan alat kesehatan yang diterima Indonesia, penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan maupun kendala dalam penanganan pandemi melalui impor dari China. Selanjutnya, penelitian yang akan datang diharapkan dapat memperluas cakupan waktu kajian dan tidak terbatas pada beberapa tahun, mengingat pandemi dan dinamika kerja sama internasional memiliki kompleksitas yang terus berkembang.

Kajian berikutnya juga dianjurkan untuk mengkaji Diplomasi Kesehatan bukan hanya dari sisi kebijakan impor, tapi juga dampaknya terhadap distribusi vaksin dan alat kesehatan di tingkat daerah serta respons masyarakat terhadap vaksinasi yang menggunakan produk dari China. Menggunakan metode

pengumpulan data yang lebih mendalam, seperti observasi langsung dan wawancara dengan berbagai pihak terkait misalnya pemerintah, produsen vaksin, diplomat, dan tenaga medis penelitian ini dapat menawarkan gambaran yang lebih komprehensif tentang pelaksanaan dan efektivitas Diplomasi Kesehatan tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini menjadi dasar yang penting dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji kebijakan serta dampak dari diplomasi impor vaksin dan alat kesehatan, termasuk perkembangan hubungan bilateral Indonesia dengan China di masa pandemi dengan pendekatan yang lebih luas dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agape, Gideon Candra. 2021. "Jalur Sutra Kesehatan: Upaya Cina Mencapai Kepentingan Geopolitik melalui Diplomasi Vaksin." *Jurnal Transformasi Global* 8. <https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/download/270/135>.
- Agustie, Rizky. 2025. "Kerjasama Indonesia - Tiongkok Dalam Menangani Covid-19 Periode 2020-2022." *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional* 2 (1): 1. <https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.2770>.
- Aisha, Nina Widyaswasti. 2023. "Diplomasi Publik China Dalam Memperbaiki Citra Di Masa Pandemi Virus Covid-19." *Jurnal Alternatif - Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 14 (2): 2. <https://ejournal-jayabaya.id/Alternatif/article/view/118>.
- Amankwah-Amoah, Joseph, and Robert E. Hinson. 2022. "Covid-19 Pandemic, Vaccine Nationalism and Counterfeit Products: Discourse and Emerging Research Themes." *Thunderbird International Business Review* 64 (6): 595–604. <https://doi.org/10.1002/tie.22302>.
- Antara News. 2020. *Bio Farma Dan Sinovac China Akan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Di Indonesia*. June 9, 2020. https://www.antaranews.com/berita/1543292/bio-farma-dan-sinovac-china-akan-uji-klinis-vaksin-covid-di-indonesia?utm_source=chatgpt.com.
- Antara News. 2023. *Indonesia Cooperating with China to Bolster Health Transformation*. April 6, 2023. <https://en.antaranews.com/news/277971/indonesia-cooperating-with-china-to-bolster-health-transformation>.
- Antaranews.com. 2020. "Sinovac-Bio Farma Mulai Transfer Teknologi Produksi Vaksin Covid-19." https://www.antaranews.com/berita/1757157/sinovac-bio-farma-mulai-transfer-teknologi-produksi-vaksin-covid-19#google_vignette.
- Antaranews.com. 2021. "China Tegaskan Komitmen Perkuat Kerja Sama Vaksin Dengan Indonesia." July 15. <https://www.antaranews.com/berita/2268914/china-tegaskan-komitmen-perkuat-kerja-sama-vaksin-dengan-indonesia>.
- Antaranews.com. 2023a. "Indonesia Cooperating with China to Bolster Health Transformation." Antara News, April 6. <https://en.antaranews.com/news/277971/indonesia-cooperating-with-china-to-bolster-health-transformation>.

- Antaranews.com. 2023b. "Indonesia Cooperating with China to Bolster Health Transformation." Antara News, April 6. <https://en.antaranews.com/news/277971/indonesia-cooperating-with-china-to-bolster-health-transformation>.
- Arlinta, Deonisia. 2021. "Dukungan Sektor Swasta Bisa Mempercepat Capaian Vaksinasi Covid-19." Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2021/03/13/dukungan-sektor-swasta-bisa-mempercepat-capaian-vaksinasi-covid-19>.
- Atmojo, Joko Tri, Prima Soultani Akbar, Saras Kuntari, Ika Yulianti, and Aquanturi Tri Darmayanti. 2020. "Definisi dan Jalur Penularan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau Covid 19." *Jurnal Pendidikan Kesehatan* 9 (1): 1. <https://doi.org/10.31290/jpk.v9i1.1513>.
- Ayati, Nayyereh, Parisa Saiyarsarai, and Shekoufeh Nikfar. 2020. "Short and Long Term Impacts of Covid-19 on the Pharmaceutical Sector." *Daru Journal of Pharmaceutical Sciences*. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40199-020-00358-5>.
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. 2023. *In Front of President Joko Widodo and President Xi Jinping, the Indonesian Minister of Health Signed the Plan of Action in the Health Sector*. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/en/di-hadapan-presiden-joko-widodo-dan-presiden-xi-jinping-menkes-ri-tanda-tangani-plan-of-action-memorandum-of-understanding-di-bidang-kesehatan/>.
- Badan Pom. 2022. *Laporan Tahunan 2021*. <https://www.pom.go.id/storage/sakip/Laporan%20Tahunan%20Direktorat%20Registrasi%20Obat%20Tahun%202021.pdf>.
- Badan Pom. n.d. "Memorandum of Understanding between the Indonesian Food and Drug Authority of the Republic of Indonesia and the National Medical Products Administration of the People's Republic of China on Regulatory Cooperation in the Field of Pharmaceutical Products and Cosmetics." <https://kerjasamahumas.pom.go.id/sikes/storage/dokumen/mou/D6ZpIPk0virxW4kPrYH6R1O3zzdDzQzmVyIWzOxO.pdf>.
- Bbc News Indonesia. 2020. *Vaksin Covid-19 Sinovac: Mengapa Indonesia Memilihnya dan Sejauh Mana Kesiapan Menggelar Vaksinasi*. 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55211319>.
- Bio Farma. 2020. *Bio Farma Pastikan Supply 50 Juta Dosis Bulk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac*. <https://www.biofarma.co.id/id/announcement/detail/bio-farma-pastikan-supply-50-juta-dosis-bulk-vaksin-covid-19-dari-sinovac>.

- Bio Farma. 2023. *Menlu RI Retno Marsudi: IndoVac Berkontribusi Dalam Diplomasi Dan Pemulihan Kesehatan Global*. January 15, 2023. <https://www.biofarma.co.id/id/announcement/detail/menlu-ri-retno-marsudi-indovac-berkontribusi-dalam-diplomasi-dan-pemulihan-kesehatan-global>
- Buana, and Dana Riksa. 2020. "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) Dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7 (3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15082>.
- Chow-Bing, Ngeow. 2020. "COVID-19, Belt and Road Initiative and the Health Silk Road." *Ngeow Chow-Bing*, 2020.
- Datanesia. 2022. "China Ungguli Amerika Di Pasar Kesehatan Indonesia." October 18. <https://datanesia.id/china-ungguli-amerika-di-pasar-kesehatan-indonesia/>.
- Dewi, Fitri Sartina. 2021. "Indonesia Telah Terima 65,5 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac." *Kabar* 24, April 30, 2021. <https://kabar24.bisnis.com/read/20210430/15/1388642/indonesia-telah-terima-655-juta-bahan-baku-vaksin-sinovac>.
- Dharmaningsih, Dwi, and Helen Andriani. 2022. "Pengendalian Persediaan Obat Di Rumah Sakit Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia: Tinjauan Literatur." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7 (11). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.10066>.
- Djalante, Riyanti, Jonatan Lassa, Davin Setiamarga, Aruminingsih Sudjatma, Mochamad Indrawan, Budi Haryanto, Choirul Mahfud, et al. 2020. "Review and Analysis of Current Responses to Covid-19 in Indonesia: Period of January to March 2020." *Progress in Disaster Science* 6 (April): 100091. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>.
- Hadori, Salsabila Ulie Mizana. 2022. "Komunikasi Krisis Kemenkes RI Selama Masa Pandemi." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7 (8): 10786–99. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i8.9218>.
- Hanafi, Lutfi. 2021. "Indonesia Gives Emergency Approval to Sinovac Covid-19 Vaccine." <https://www.openaccessgovernment.org/sinovac-covid-19-vaccine/101340/>.
- Hidayat, Aldian, Syaiful Anam, and Ahmad Mubarak Munir. 2022. "Diplomasi Vaksin: Strategi Indonesia dalam Memperkuat Keamanan Kesehatan Nasional di Tengah Pandemi Covid-19." *Indonesian Journal of Global Discourse* 4 (1): 17–34. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v4i1.44>.
- Humas. 2021a. "Kemenkes Pastikan Vaksin Impor Sinovac Habis Sebelum Masa Simpannya Berakhir." Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, March 17,

2021.
<https://setkab.go.id/kemenkes-pastikan-vaksin-impor-sinovac-habis-sebelum-masa-simpannya-berakhir/>.
- Humas Bkpk. 2022. "Indonesia Pimpin G20 Susun Kebijakan Kesehatan Global." *Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | BKPK Kemenkes*, March 29, 2022.
<https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/indonesia-pimpin-g20-susun-kebijakan-kesehatan-global/>.
- Igj. 2020. "Diplomasi Vaksin Covid-19 Indonesia: 'Tantangan Akses Publik Atas Vaksin Dan Layanan Kesehatan Berkeadilan.'"
<https://igj.or.id/2020/12/17/diplomasi-vaksin-covid-19-indonesia-tantangan-akses-publik-atas-vaksin-dan-layanan-kesehatan-berkeadilan/>.
- Jala Hoaks. 2025. "Beredar Surat Edaran Di Aplikasi Whatsapp Mengenai Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Surat Edaran Imbauan Waspada Penyebaran Covid-19." Jakarta Lawan Hoaks.
<https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-PERANGKAT-ELEKTRONIK-DALAM-VAKSIN-COVID-19-AKAN-DIAKTIFKAN-PADA-4-OKT-2023>.
- Jannah, Luk Luk Al, Aryo Genta, Dian Mulia, Ibnu Fatih, Eko Nurcahyo, Jelia Stefani, Syarif Muhammad Ibrahim, et al. 2024. *Menuju Transformasi Digital Logistik Kesehatan*. 2024.
<https://farmalkes.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2025/01/Infarkes-3-2024-1.pdf>.
- Kemenkes. 2021. "Upaya Kemenkes Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19." July 9.
<https://kemkes.go.id/eng/upaya-kemenkes-hadapi-lonjakan-kasus-covid-19>.
- Kemenkes. 2025. "Workbook: Grafik Covid-19."
https://dashboard.kemkes.go.id/views/GrafikCOVID-19/Dashboard4/ab28248f-f3a6-4519-8de9-c5e11f4fcc8f/168bc908-2afb-4521-bcff-b3a81275b52a?%3Aincrement_view_count=no&%3Aembed=y&%3Adisplay_spinner=no&%3AshowAppBanner=false&%3Atoolbar=yes&%3Aembed_code_version=3&%3AloadOrderID=0&%3Atabs=no.
- Kementerian Kesehatan RI, dir. n.d. *Konferensi Pers: Perkembangan Covid-19 Di Indonesia*. Accessed July 18, 2025.
https://www.youtube.com/watch?v=_gvSzKa5qb0.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. "Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)."
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/136940/pmk-no-34pmk042020>.

- Kementerian Sekretariat Negara. 2020. "Tinjau Fasilitas Produksi Bio Farma, Presiden: Indonesia Mampu Produksi Vaksin Sendiri." https://www.setneg.go.id/baca/index/tinjau_fasilitas_produksi_bio_farma_presiden_indonesia_mampu_produksi_vaksin_sendiri.
- Kickbusch Ilona, Nikogosian Haik, Kazatchkine Michel, and Kőkény Mihály. 2021. *A Guide to Global Health Diplomacy*. <https://www.graduateinstitute.ch/sites/internet/files/2021-02/GHC-Guide.pdf>.
- Kompas.com. 2020. *Bahas Vaksin Covid-19 Dengan Menlu China, Menteri Retno Bicara Soal Keamanan Hingga Harga*. August 20, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/20/20480381/bahas-vaksin-covid-19-dengan-menlu-china-menteri-retno-bicara-soal-keamanan?page=all>.
- Kompaspedia. 2021. "PSBB Hingga PPKM, Kebijakan Pemerintah Menekan Laju Penularan Covid-19." <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/psbb-hingga-ppkm-kebijakan-pemerintah-menekan-laju-penularan-covid-19>.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. 2021. *Retno Marsudi: Diplomasi Kesehatan Jadi Salah Satu Prioritas Diplomasi Indonesia*. April 28, 2021. <https://lemhannas.go.id/berita/berita-utama/1063-retno-marsudi-diplomasi-kesehatan-jadi-salah-satu-prioritas-diplomasi-indonesia/id>.
- Limantara, Anastasia Cattleya, Elvira Gosal, Hanna Anindita Paramastuti, Ignatius Bintang, Yuliyanti Seva, and Zulaekha Amalia. n.d. *Tujuan Diplomasi Kesehatan Indonesia di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus dalam Diplomasi Bilateral Indonesia dengan Fiji dan Kepulauan Solomon*.
- Liur, Marrinda Kevin Jeremiah, Triesanto Romulo Simanjuntak, and Novriest Umbu. 2024. "Analisa Vaccine Diplomacy Indonesia-Cina Dalam Menanggulangi Pandemi Covid -19." *Journal of Comprehensive Science* 3 (7): 2428–34. <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i7.796>.
- Liu Liangtao, Yongli Huang, and Jiyong Jin. 2022. "China's Vaccine Diplomacy and Its Implications for Global Health Governance." *Mdpi* 10 (7). <https://doi.org/10.3390/healthcare10071276>.
- Loka Data. n.d. "Kasus Meninggal Covid-19 Bulanan, 2020-2021." <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kasus-meninggal-covid-19-bulanan-2020-2021-1609822928>.
- Malik, and Yusuf Idrus. 2022. "Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Indonesia Pasca Pandemi Covid-19." *Jurnal Sentris* 3 (1): 74–89. <https://doi.org/10.26593/sentris.v3i1.5643>.

- Margono, Valerie Tania, Nivy Irawan, Jacinda Graciella, Veronica Ivana Putri Calista, and Kristanto Setiawan. 2021. "Aktivitas Diplomasi Kesehatan Indonesia-Tiongkok di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Sentris Edisi Khusus Diplomasi*, October 11, 2021. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sentris/article/view/5188>.
- Matakena, Mariah Agnes, and Johanis Steny Franco Peilouw. 2021. "Advance Purchase Agreement Sebagai Instrumen Pembatasan Memperoleh Vaksin Covid-19 dari Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 1 (10).
- Maysarah, Siti. 2024. "Diplomasi Kesehatan Digital: Pembelajaran Dari Covid-19." <https://www.kompasiana.com/sitimaysarah7076/6752d76d34777c5d9b164b69/diplomasi-kesehatan-digital-pembelajaran-dari-covid-19>.
- Mei, Yujie. 2023. *Belt and Road Initiative Aand Health Silk Road: An Alternative Path for Pasific Island Countries to Participate in Global Public Health Governance*. October 18, 2023. <https://ghrp.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41256-023-00329-8>.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2020. "Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia." <https://dinkes.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2021/01/KMK-9860-Tahun-2020-salinan.pdf>.
- National Medical Products Administration. 2021. *China's NMPA, Indonesian BPOM Sign MoU on Regulatory Cooperation of Pharmaceutical Products and Cosmetics*. https://english.nmpa.gov.cn/2021-06/16/c_633242.htm.
- Ningsih, Tri Wahyu Retno, Kezia Yansen Pasang, Deasy Anastasia Putri, and Ayesa Ayesa. 2023. "Hubungan Bilateral Tiongkok-Indonesia dalam Bidang Kesehatan." *Jurnal Cakrawala Mandarin* 7 (1): 1. <https://doi.org/10.36279/apsmi.v7i1.178>.
- Rakhmat, Muhammad Zulfikar, and Yeta Purnama. 2022. "China's Expanding Health Diplomacy in Indonesia." *The Diplomat*. November 16. <https://thediplomat.com/2022/11/chinas-expanding-health-diplomacy-in-indonesia/>.
- Risky Mohammad Nugraha. 2021. "BPOM Sheds Light on Validity of Sinovac Covid-19 Vaccine." *Tempo*, January 11, 2021. <https://en.tempo.co/read/1422286/bpom-sheds-light-on-validity-of-sinovac-covid-19-vaccine>.
- Sekretariat Kabinet RI. 2020. *Peninjauan Pelaksanaan Uji Klinis Tahap III Vaksin Covid-19, 11 Agustus 2020, Di Gedung Eyckman, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat*. <https://setkab.go.id/peninjauan-pelaksanaan-uji-klinis-tahap-iii-vaksin-cov>

id-19-11-agustus-2020-di-gedung-eyckman-fakultas-kedokteran-universita
s-padjadjaran-kota-bandung-provinsi-jawa-barat/.

Sekretaris Kabinet RI. 2021. *BPOM Issues Emergency Use Authorization for Bio
Farmas COVID-19 Vaccine*.
<https://setkab.go.id/en/bpom-issues-emergency-use-authorization-for-bio-farmas-covid-19-vaccine/>.

Sinovac. 2020. *Sinovac Signs Agreement with Bio Farma Indonesia for
COVID-19 Vaccine Cooperation*.
<https://www.sinovac.com/en-us/news/id-2841>.

Sohrabi, Catrin, Zaid Alsafi, Niamh O'Neill, Mehdi Khan, Ahmed Kerwan, Ahmed Al-Jabir, Christos Iosifidis, and Riaz Agha. 2020. "World Health Organization Declares Global Emergency: A Review of the 2019 Novel Coronavirus (Covid-19)." *International Journal of Surgery* 76 (April): 71–76. <https://doi.org/10.1016/j.ijvs.2020.02.034>.

Sorongon, Tommy Patrio. 2021. *Menlu Retno Buka-Bukaan Soal Diplomasi
Vaksin Di Era Pandemi*. July 15, 2021.
<https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20210715141003-25-261167/menlu-retno-buka-bukaan-soal-diplomasi-vaksin-di-era-pandemi>.

Suhita, Anisa Risanti, Filasafia Marsya Ma'rifat, and Trisni Salsa Ramadina. 2021. "China's National Interest in Providing Assistance to Indonesia in Handling the Covid-19 Pandemic: Normative and Material." *Jurnal Universitas Gajah Mada* 3(1). <https://doi.org/10.22146/globalsouth.69867>.

Susilowati, Ida, Anisa Nuryanti Affandi, Cut Jihan Raihana, and Elsa Iqlima Az-Zahra. 2023. "Kerjasama Bilateral Indonesia-Tiongkok Dalam Diplomasi Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 10 (1): 125–40. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31116>.

The Jakarta Post. 2021. "Retno's Vaccine Diplomacy - Editorial." *The Jakarta Post*.
<https://www.thejakartapost.com/academia/2021/07/13/retnos-vaccine-diplomacy.html>.

Triwibowo, Albert, and Jessica Martha. 2021. "Diplomasi Middle-Power Indonesia di Masa Pandemi." *Indonesian Perspective* 6 (2): 123–41. <https://doi.org/10.14710/ip.v6i2.43540>.

Unairnews. 2023. "Kajian Dampak Covid-19 Terhadap Kesehatan, Ekonomi, Pekerjaan Dan Kehidupan Sosial Masyarakat Di Indonesia." <https://unair.ac.id/kajian-dampak-covid-19-terhadap-kesehatan-ekonomi-pekerjaan-dan-kehidupan-sosial-masyarakat-di-indonesia/>.

Unpad.ac.id. 2020. "Pengembangan Vaksin Covid-19 di Indonesia Hadapi

- Tantangan.” Kampus. Universitas Padjadjaran, September 17, 2020. <https://www.unpad.ac.id/2020/09/pengembangan-vaksin-covid-19-di-indonesia-hadapi-tantangan/>.
- Voa Indonesia. 2021. “China dan Indonesia Perluas Kerjasama Vaksin.” April 21. <https://www.voaindonesia.com/a/china-dan-indonesia-perluas-kerjasama-vaksin/5860701.html>.
- Widyawati. 2020. “Kemenkes Harus Siap Jalani Diplomasi Kesehatan di Era New Normal.” Artikel daring. Kemenkes, July 1. <https://kemkes.go.id/id/kemenkes-harus-siap-jalani-diplomasi-kesehatan-era-new-normal>.
- Widyawati. 2022. “Cakupan Vaksinasi Nasional Masuk Peringkat 5 Besar Dunia.” Kemenkes, January 6. <https://kemkes.go.id/id/%20cakupan-vaksinasi-nasional-masuk-peringkat-5-besar-dunia>.
- World Health Organization. 2021. “Critical Preparedness, Readiness and Response Actions for Covid-19.” <https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19>.
- Yahya, Jihan Nadya, and Helga Yohana Simatupang. 2023. “Diplomasi Vaksin Dalam Kerja Sama Indonesia Dengan Tiongkok Di Masa Pandemi Covid-19.” *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 3 (2): 106–25. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v3i2.2855>.